

**PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM
PENCEGAHAN *FRAUD***
(Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Regional I Sumut-Aceh)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

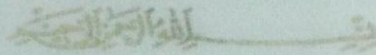
NAMA : MHD RIDHO SYAHPUTRA
NPM : 1505170002
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, mengartikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **MHD RIDHO SYAHPUTRA**
 N.P.M : **1505170002**
 Program Studi : **AKUNTANSI**
 Judul Skripsi : **PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN FRAUD PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) REGIONAL I SUMUT-ACEH**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

DR. IRFAN, S.E., M.M.

ISNA ARDILA, S.E., M.Si.

UMSU

Pembimbing

MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.Si, Ak.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl.Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MHD RIDHO SYAHPUTRA
NPM : 1505170002
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Skripsi : PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN
(FRAUD) PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
REGIONAL I SUMUT- ACEH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Muhammad Fahmi, S.E, M.Si, Ak.

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. TANURI, S.E, M.M, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PRODI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
PEMBIMBING MAGANG : MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.Si, Ak.

NAMA MAHASISWA : MHD RIDHO SYAHPUTRA
NPM : 1505170002
KONSENTRASI : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN
FRAUD (STUDI KASUS PADA PT. POS INDONESIA
(PERSERO) REGIONAL SUMUT-ACEH

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF | KETERANGAN |
|---------|--|-------------|------------|
| 20/2-19 | Pembahasan dan Sifat Perdagangan Internasional | [Signature] | Perbaikan |
| 20/3-19 | Pembahasan Hasil Penelitian | [Signature] | Perbaikan |
| 4/3-19 | Pembahasan Mengenai "Integritas Kerjasama Pada PT. Pos" | [Signature] | Perbaikan |
| 12/3-19 | Wawancara Pada Laporan Penelitian Kesimpulan Dan Saran Penelitian | [Signature] | Perbaikan |
| 1/3-19 | Kesimpulan Dan Saran | [Signature] | Perbaikan |
| 5/3-19 | Az | [Signature] | Az |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dosen Pembimbing

[Signature]
3/3-19

MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.Si, Ak.

Medan,
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mhd Ridho Syahputra

NPM : 1505170002

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* Studi Kasus
Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari data-data sah yang ada diperusahaan tempat saya melaksanakan riset.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2019

g menyatakan
METERAI
TEMPEL
ZBB3CAFF841630268
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mhd Ridho Syahputra

ABSTRAK

MHD RIDHO SYAHPUTRA. NPM. 1505170002. Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh). Skripsi 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah audit internal yang dilakukan telah memadai, apakah audit internal telah berperan dalam pencegahan *fraud*, dan bagaimanakah peranan audit internal dalam pencegahan *fraud* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh. Objek pada penelitian ini pada bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh yang dilakukan telah memadai didukung dengan pengujian unsur audit internal dari perencanaan hingga tindak lanjut yang ada telah berjalan efektif. Peranan audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh telah berperan dalam pencegahan *fraud*, dimana unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedepannya integritas pada diri SDM-lah yang dituntut untuk dapat mencegah risiko *fraud* atau dalam perekrutan SDM lebih dievaluasi pada nilai integritas calon pegawai guna mendapatkan SDM yang unggul dan dapat dipercaya sehingga dapat menurunkan tingkat risiko *fraud*.

Kata Kunci: Audit internal, Pencegahan fraud

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah Subhanallah Wa Ta'ala, maka dengan seluruh kerendahan hati peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanallah Wa Ta'ala, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Tujuan penyusunan skripsi ini yaitu sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi yang peneliti susun dengan judul “Peranan Audit Internal dalam Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut – Aceh) yang beralamat di Jl.Prof. H.M. Yamin, SH No.44 Medan.

Peneliti menyadari sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta kelemahan di dalamnya dan juga dalam penyelesaian skripsi ini banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik materi maupun spiritual. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan teristimewa kepada orang tua tercinta Bapak Sofyan dan Ibunda Siti Zahara, yang telah banyak memberikan limpahan kasih sayangnya, perhatian, cinta, dan nasehat kepada peneliti yang tentu tidak akan bisa peneliti balas

sehingga menjadikan semangat yang luar biasa untuk terus mengejar prestasi yang baik serta kepada adik tersayang yang telah banyak memberikan dukungan.

Juga antara lain kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si sebagai Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Muhammad Fahmi, S.E, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberikan ilmu pengetahuan serta membimbing, membina dan juga mengarahkan sehingga tersusunnya proposal ini.

8. Bapak Masridal selaku Manajer Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut–Aceh, dan bapak Rahmat Hidayat yang telah membimbing dan mendukung penulis selama melaksanakan riset di PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut– Aceh.
9. Bapak Laode selaku Kepala Perwakilan Satuan Pengawas Internal PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut–Aceh, Bapak Jafar selaku Wakil Kepala Perwakilan Satuan Pengawas Internal PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut–Aceh, Bapak Jayadin, Bapak Kasno, Bapak Freddy, Bapak Farid, dan Bapak Iswandi, serta seluruh pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut - Aceh yang telah memberikan kenyamanan dengan keramah-tamahannya serta membantu menyediakan data dan juga waktu dan tempat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman peneliti stambuk 2015 Akuntansi A malam yang saling memberikan semangat dan juga informasi-informasi mengenai penyusunan proposal ini.
11. Teman – teman cleaning service PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh seperjuangan yang telah banyak mendukung peneliti untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah penulis.

Akhir kata, peneliti memohon ampun kepada Allah SWT. dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga pembaca, amiiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2019

Peneliti

MHD RIDHO SYAHPUTRA

1505170002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Batasan Masalah | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 9 |
| A. Uraian Teori | 9 |
| 1. Audit Internal | 9 |
| a. Konsep Audit | 9 |
| b. Definisi Audit Internal | 10 |
| c. Tujuan dan Fungsi Audit Internal | 11 |
| d. Peranan Audit Internal | 13 |
| e. Independensi | 19 |
| f. Kemampuan Profesional | 20 |
| g. Tanggungjawab dan Kewenangan Audit | 21 |
| h. Ruang Lingkup Audit | 22 |
| i. Kedudukan Audit Internal | 23 |
| 2. <i>Fraud</i> (Kecurangan) | 26 |
| a. Definisi <i>Fraud</i> | 26 |
| b. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya <i>Fraud</i> | 27 |
| c. <i>Red Flag</i> | 28 |
| d. Klasifikasi <i>Fraud</i> | 31 |
| e. Bentuk-bentuk <i>Fraud</i> | 34 |
| 3. Pencegahan <i>Fraud</i> | 37 |
| a. <i>Control Environment</i> (Lingkungan Pengendalian) .. | 40 |
| b. <i>Risk Assesment</i> (Penaksiran Resiko) | 42 |
| c. <i>Information dan Communication</i> (Informasi dan Komunikasi) | 42 |

| | |
|---|----|
| d. <i>Control Activities</i> (Aktivitas Pengendalian) | 43 |
| e. <i>Monitoring</i> (Pemantauan) | 47 |
| B. Penelitian Terdahulu | 49 |
| C. Kerangka Pemikiran | 50 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Penelitian | 53 |
| B. Definisi Operasional Variabel | 53 |
| C. Subjek, Objek dan Waktu Penelitian | 55 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 56 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 56 |
| F. Teknik Analisis Data | 57 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian | 58 |
| B. Pembahasan | 77 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 84 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel I – 1 Jumlah Kasus Kecurangan di Indonesia | 3 |
| Tabel I – 2 Jumlah Kasus Kecurangan Dalam Tindak Lanjut pada wilayah PT.Pos Indonesia Regional I Sumut-Aceh | 4 |
| Tabel II – 1 Penelitian Terdahulu | 49 |
| Tabel III – 1 Jadwal Penelitian | 55 |
| Tabel IV- 1 Kriteria Risiko Kinerja Penjualan | 74 |
| Tabel IV – 2 Kriteria Risiko Kinerja Jasa Keuangan | 74 |
| Tabel IV – 3 Kriteria Risiko Kinerja Operasional | 75 |
| Tabel IV – 4 Kriteria Risiko Availibility Jaringan IT | 75 |
| Tabel IV – 5 Peta Risiko | 75 |
| Tabel IV – 6 Deskripsi <i>Fraud</i> | 77 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar II – 1 Kedudukan Audit Internal dibawah Direktur Keuangan di dalam organisasi perusahaan | 24 |
| Gambar II – 2 Kedudukan Audit Internal dibawah Direktur Utama di dalam organisasi perusahaan | 25 |
| Gambar II – 3 Kedudukan Audit Internal merupakan staf dari Dewan Komisaris di dalam organisasi perusahaan | 25 |
| Gambar II – 4 <i>Fraud Triangle</i> | 27 |
| Gambar II – 5 Kerangka Pemikiran | 52 |
| Gambar IV – 1 Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) | 67 |
| Gambar IV – 2 <i>Job Description</i> Kaper SPI-1 | 68 |
| Gambar IV – 3 <i>Job Description</i> Wakaper SPI-1 | 68 |
| Gambar IV – 4 <i>Job Description</i> Auditor SPI-1 | 69 |
| Gambar IV – 5 <i>Job Description</i> Staf Administrasi SPI-1 | 69 |
| Gambar IV – 6 Bukti Kas Keluar Bank PT. Pos Indonesia (Persero) | 70 |
| Gambar IV – 7 Nota Permintaan Pembayaran PT. Pos Indonesia (Persero) | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan maupun instansi memiliki tujuannya masing-masing namun berorientasi pada satu tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengamankan aset yang dimiliki untuk menjamin kepastian akan terhindarnya kerugian yang tidak diharapkan. Hal yang tidak diharapkan juga dapat terjadi oleh faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan. Dari segi tindak kesengajaan tersebut menjadi sumber yang berdampak buruk atau merugikan bagi perusahaan maupun instansi akibat dari tindakan pelaku kecurangan.

Kecurangan (*Fraud*) Menurut Tuanakotta (2013, hal.28) “setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi”.

ACFE dalam Tuanakotta (2010, hal.195-204) membagi *fraud* (kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu: Kecurangan laporan keuangan (*Financial statement fraud*), penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*).

Penyebab terjadinya *fraud* menurut Tuanakotta (2013, hal.47-51) terdiri dari tiga kondisi umum yang hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu : “tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).”

Untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan, audit internal diperlukan keberadaannya di dalam perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berdasarkan tugasnya yaitu mengevaluasi suatu sistem dan prosedur yang telah disusun secara benar dan sistematis serta apakah telah diimplementasikan dengan sesuai standar, melalui pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit organisasi.

internal audit juga melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya: menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal; memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen; memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan; dll. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tersebut dapat disimpulkan bahwa internal audit antara lain memiliki peranan dalam: pencegahan kecurangan (*fraud prevention*), pendeteksian kecurangan (*fraud detection*), penginvestigasian kecurangan (*fraud investigation*). (Amrizal, 2004)

Setiap jenis-jenis kecurangan yang terjadi merupakan sesuatu yang harus disiasati karena menimbulkan kerugian yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan atau entitas.

Tabel I - 1
Jumlah Kasus Kecurangan di Indonesia

| No. | Jenis Fraud | Jumlah Kasus | Persentase |
|-----|---|--------------|------------|
| 1 | Korupsi (<i>corruption</i>) | 178 | 77% |
| 2 | Penyalahgunaan aktiva / kekayaan organisasi atau negara (<i>asset misappropriation</i>) | 41 | 19% |
| 3 | Kecurangan laporan keuangan (<i>financial statement fraud</i>) | 10 | 4% |

Sumber: ACFE Indonesia (2016)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus tindakan korupsi merupakan kasus terbanyak di antara jenis-jenis kecurangan yang lain namun penyalahgunaan aktiva (*asset misappropriation*) merupakan kecurangan dengan jumlah urutan kedua yang tidak bisa dianggap sederhana lantaran kurang dipublikasikan. Maka di dalam suatu perusahaan peran audit internal sesuai dengan fungsinya berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. (Amrizal, 2004)

Namun upaya pencegahan terjadinya kecurangan sepertinya bukan suatu hal yang mudah. Seperti yang terjadi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh yang telah memiliki divisi audit internal. PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan posdimana juga merupakan salah satu penggerak dan pendorong laju perekonomian di Indonesia.

Kecurangan bisa terjadi dimana , dalam bentuk apa , dan kapan saja. Dalam beberapa tahun terakhir didapatkan kecurangan (*fraud*) dalam lingkup PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I wilayah Sumatera Utara-Aceh yang sebaiknya mendapat perhatian agar tidak menghambat kemajuan perusahaan itu sendiri.

Tabel I - 2
Jumlah Kasus Kecurangan Dalam Tindak Lanjut
pada wilayah PT.Pos Indonesia Regional I Sumut-Aceh

| No | Tahun | Jumlah Kasus Dalam Tindaklanjuti |
|----|-------|----------------------------------|
| 1 | 2013 | 16 Kasus |
| 2 | 2014 | 14 Kasus |
| 3 | 2015 | 15 Kasus |
| 4 | 2016 | 15 Kasus |
| 5 | 2017 | 24 Kasus |
| 6 | 2018 | 41 Kasus |

Sumber : Divisi SDM PT. Pos Regional I Sumut-Aceh

Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh diantaranya adalah kasus kekurangan kas pada Kantor Pos Cabang, kecurangan loket giro online (gol), menungkan tabungan milik nasabah yang dilakukan petugas loket, dan masih ada beberapa kecurangan yang terjadi namun menjadi privasi perusahaan untuk dipublikasikan.

Sehubungan dengan data tersebut, Albrecht (2003, hal.96) menyatakan bahwa "*Fraud is reduced and often prevented (1) by creating of honesty and, openness, and assistance and (2) by eliminating opportunities to commit fraud*". Dapat disimpulkan bahwa kecurangan dapat dikurang dengan menghilangkan kesempatan berbuat curang. Audit internal harus dapat

memastikan apakah kecurangan itu memang ada atau tidak. Untuk memastikannya, audit internal akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dan aktivitas karyawan perusahaan berdasarkan kriteria yang tepat untuk merekomendasikan suatu rangkaian tindakan kepada pihak manajemen.

Disamping itu, audit internal harus mempunyai alat pengendalian yang efektif sehingga kecurangan dapat dicegah sedini mungkin. Hal ini berkaitan dengan manfaat audit internal yang mengevaluasi pengendalian internal seperti yang dikemukakan Andayani (2011, hal.58) “ Auditor internal bisa sangat membantu manajemen dengan mengevaluasi sistem pengendalian dan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal”. Karena pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif; pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka; pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan; dll.(Amrizal, 2004)

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa audit internal seharusnya dapat melakukan perbaikan dalam suatu organisasi untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kecurangan dikemudian hari.

Berdasarkan seluruh uraian yang peneliti kemukakan, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul :

“Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* : Studi Kasus pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terjadi penambahan kasus *fraud* pada tahun 2017 dan 2018.
2. Masih belum efektifnya prosedur audit yang diterapkan audit internal dalam mencegah *fraud*.
3. Diperlukan kesadaran auditor internal dalam mengantisipasi risiko *fraud*.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini agar lebih terarah sehingga tujuan penelitian akan tercapai, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu kecurangan/*fraud* yang peneliti ungkapkan dalam penelitian ini terkhusus pada penyalahgunaan aktiva (*fraud asset misappropriation*) yaitu terdiri atas kecurangan kas dan penyalahgunaan aset lainnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah audit internal yang dilakukan telah memadai di PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh ?
2. Apakah audit internal telah berperan dalam pencegahan *fraud* di PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh ?
3. Bagaimana peranan audit internal dalam pencegahan *fraud* di PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis audit internal yang dilakukan telah memadai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh.
2. Untuk menganalisis audit internal telah berperan dalam pencegahan *fraud* di PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh.
3. Untuk menganalisis peranan audit internal dalam pencegahan *fraud* di PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya yaitu :

1. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui mengenai peranan audit internal dalam pencegahan fraud dan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai kajian yang diteliti.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

3. Bagi PT. Pos Indonesia (Persero)

Sebagai tambahan referensi dan kelengkapan data bagi auditor internal perusahaan untuk meningkatkan kualitasnya dalam penugasannya dan meningkatkan kemampuannya untuk mencegah tindakan *fraud*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Audit Internal

a. Konsep Audit

Dalam arti luas audit atau pemeriksaan bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut [auditor](#). Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.

Menurut Agoes (2012, hal. 3) pengertian audit adalah sebagai berikut:

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Arens,dkk (2009, hal. 2) pengertian audit adalah :
“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan definisi audit diatas dapat memberi petunjuk bahwa audit memiliki fungsi yang dapat membantu perusahaan untuk melakukan pencegahan pada risiko *fraud* yang dapat terjadi.

b. Definisi Audit Internal

Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Pada awalnya, audit internal berfungsi sebagai “adik” dari profesi auditor eksternal, dengan pusat perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. Namun saat ini audit internal telah memisahkan diri menjadi disiplin ilmu yang berbeda dengan pusat perhatian yang lebih luas. Audit internal modern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas control, kinerja, risiko, dan tata kelola (*governance*) perusahaan publik maupun privat. (Wahyuni, 2017)

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

menerangkan Audit Internal sebagai berikut :

Audit internal adalah peran yang menantang dan penting yang membantu organisasi untuk berhasil. Peran audit internal adalah untuk memberikan jaminan dan konsultasi independen. Auditor internal perlu memahami risiko keuangan tetapi juga harus memahami aspek organisasi yang lebih luas untuk mendukung peningkatan bisnis

Sedangkan Sawyer's (2002, hal.10) yang diterjemahkan oleh Wulandari (2017) menjelaskan bahwa Audit Internal yaitu :

sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat di andalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa di terima telah diikuti; (4) kri teria operasi yang memuaskan telah di penuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomi dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Definisi Audit Internal menurut Tugiman (2001, hal. 11) yaitu “Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa audit internal adalah proses pemeriksaan yang dikelola secara independen di dalam organisasi terhadap laporan dan catatan akuntansi perusahaan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Audit internal diarahkan untuk membantu seluruh anggota pimpinan, agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam mencapai tujuan organisasi.

c. Tujuan dan Fungsi Audit Internal

Tujuan audit internal yang dikemukakan Ludita (2013, hal. 2) yang mengutip pendapat Tampubolon (2005, hal. 1) menyatakan tujuan audit internal adalah Membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Sedangkan Fungsi audit internal adalah sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang.

Fungsi audit internal yang dikemukakan Ludita (2013, hal. 2) yang mengutip pendapat Sawyer (2005, hal. 32) menyatakan fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain untuk

memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Fungsi audit internal bagi manajemen sebagai berikut:

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak.
2. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.
3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior.
4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis.
5. Membantu proses pengambilan keputusan.
6. Menganalisis masa depan, bukan hanya untuk masa lalu.
7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan.

Fungsi audit internal dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) (2001: 322.2) yaitu “Fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian internal, auditor harus berusaha memahami fungsi audit intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang relevan dengan pernyataan audit”.

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi audit internal yaitu memeriksa, menilai, mengawasi dan membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

d. Peranan Audit Internal

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2012, hal.212-213) adalah sebagai berikut :

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan definisi diatas dapat memberikan petunjuk bahwa yang melakukan suatu peran adalah sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Sehingga peranan dalam penelitian ini menggambarkan fungsi seseorang atau bagian di perusahaan.

Manajemen tidak dapat bekerja secara sendiri untuk memastikan rencana operasi , keuangan, kebijakan dan prosedur yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. Perlu adanya penilai sekaligus pengawas untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka dari itu peranan audit internal diperlukan keberadaannya.

Menurut Ety & Istiyawati (2015, hal. 4) yang mengutip pendapat Kuntadi (2009) menjelaskan peran audit internal adalah:

Peranan audit internal adalah untuk membantu perusahaan dalam melakukan audit bagi kepentingan manajemen, memecahkan beberapa hambatan dalam sebuah organisasi dan mendukung upaya manajemen untuk membangun budaya yang mencakup etika, kejujuran, dan integritas. Sebaik apapun yang dilakukan oleh audit internal dalam pelaksanaan tugas namun apabila integritas manajemen tidak mendukung dalam upaya

memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh audit internal telah dilaksanakan, maka hal tersebut menjadi sia-sia.

Menurut Tugiman (2003, hal. 53-78)terdapat 4 tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan audit internal untuk melakukan pengawasan yang efektif yaitu:

1. Perencanaan Audit
2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi
3. Penyampaian Hasil Audit
4. Tindak Lanjut Hasil Audit

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan dari kepala satuan pengawas intern. Apabila rencana audit sudah disetujui, maka auditor internal melakukan pengujian dan penevaluasian informasi. Informasi yang diperoleh dalam melakukan audit tersebut harus dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti.

Berikut ini penjelasan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan audit, yaitu :

1. Perencanaan Audit

Auditor internal harus merencanakan terlebih dahulu setiap tugas audit yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari perencanaan audit yaitu agar audit yang dilakukan terarah dan tepat sasaran. Menurut Tugiman (2003, hal. 53-59) dalam penelitian Kusumah (2008) menyatakan bahwa perencanaan audit internal harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal berikut ini :

1. Penetapan tujuan audit dan lingkup audit
2. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diaudit
3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit
4. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu
5. Melakukan survei
6. Penulisan program audit
7. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan
8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam perencanaan audit, auditor internal harus menentukan tujuan audit dengan menjelaskan berbagai hal yang akan dicapai dalam pelaksanaan audit serta menyatakan lingkup pekerjaan audit internal. Sehubungan dengan itu, auditor internal harus memperoleh informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diaudit. Dalam pelaksanaan kegiatan audit, dibutuhkan tim audit internal yang memiliki pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu.

Selanjutnya, tim audit internal mengadakan rapat dengan manajemen yang bertanggungjawab terhadap kegiatan yang akan diaudit. Sebelum melakukan audit, tim audit internal harus melakukan survei lapangan untuk memperoleh informasi dan mengidentifikasi berbagai area penting yang memerlukan penekanan khusus. Dari survei yang dilakukan tersebut, auditor internal akan membuat program audit. Setelah program audit dibuat, pimpinan audit internal harus menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil

audit yang akan disampaikan serta menyetujui rencana kerja audit yang dilakukan.

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Setelah mendokumentasikan perencanaan audit, auditor internal harus mengumpulkan informasi, melakukan analisis, menginterpretasikan, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi menurut Tugiman (2003, hal. 59-68) dalam penelitian Kusumah (2008) yaitu :

1. Mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tujuan dan lingkup audit
2. Informasi harus mencukupi, kompeten, relevan
3. Penyeleksian terhadap prosedur audit
4. Melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi
5. Membuat kertas kerja audit

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal harus mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan lingkup audit. Informasi yang diperoleh harus cukup, kompeten, relevan dan berguna bagi penyediaan rekomendasi atas temuan audit. Selanjutnya, auditor internal harus menyeleksi prosedur audit, termasuk teknik pengujian yang dipergunakan apakah praktis atau tidak, dan apakah perlu diubah bila keadaan menghendaki.

Auditor internal harus melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi adalah

untuk menjamin terpeliharanya objektivitas dan tercapainya sasaran audit. Sehubungan dengan itu, auditor internal akan membuat kertas kerja audit. Kertas kerja audit ini harus mencatat semua informasi yang diperoleh dan analisis-analisis yang dikemukakan haruslah mendukung temuan audit dan rekomendasi yang dilaporkan.

3. Penyampaian Hasil Audit

Setelah melakukan pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal harus menyampaikan laporan hasil audit yang dilakukannya. Menurut Tugiman (2003, hal. 68-75) menyatakan bahwa auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani
2. Mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan yang tepat
3. Laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu
4. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan audit
5. Laporan mencantumkan rekomendasi bagi perkembangan yang mungkin dicapai
6. Mencantumkan pandangan dari pihak yang diaudit tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi
7. Pimpinan audit internal harus mereview dan menyetujui laporan audit akhir

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa setelah pengujian terhadap audit (*audit examination*) selesai dilakukan, auditor internal akan membuat laporan tertulis yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk

mengesahkannya. Dalam mengusulkan kesimpulan dan rekomendasinya, auditor internal harus melakukan diskusi terlebih dahulu dengan manajemen tertentu. Laporan yang disampaikan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu. Sehubungan dengan itu, laporan yang disampaikan harus menyajikan tujuan, lingkup dan hasil audit dan bila keadaan memungkinkan, laporan harus berisi pernyataan tentang pendapat auditor.

Rekomendasi atas perbaikan yang masih dapat dilakukan, pernyataan kepuasan atas prestasi yang dicapai dan tindakan perbaikan dapat dicantumkan dalam laporan hasil audit. Selain itu, pandangan dari pihak yang diaudit tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan hasil audit tersebut.

Selanjutnya, pimpinan audit internal harus menelaah kembali dan menyetujui laporan audit akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.

4. Tindak Lanjut Hasil Audit

Auditor internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan tindakan-tindakan perbaikan yang memadai telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam audit. Hal ini sesuai dengan norma audit yang dikutip Tugiman (2003, hal. 75) dalam penelitian Kusumah (2008) yang menyatakan bahwa “pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat”

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa standar audit mewajibkan auditor internal berusaha agar rekomendasinya dilaksanakan oleh pihak manajemen serta memantau tindaklanjut untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh manajemen.

e. Independensi

Independensi dalam audit bukan merupakan suatu hak mutlak yang dapat dipaksa pelaksanaannya, melainkan suatu kewenangan yang perlu dipertahankan. Independensi adalah sikap tidak memihak, bebas dari benturan kepentingan dan obyektif dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar auditor dipercaya oleh masyarakat umum. Jika seorang auditor internal tidak dapat bersikap independen, maka akan sulit dalam upaya mencegah terjadinya *fraud*.

Didukung dalam *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)* seksi 220 no.2 Per 1 Januari 2001, menyatakan bahwa independensi yaitu tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

f. Kemampuan Profesional

Auditor internal dituntut untuk memiliki kualitas dan mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Dengan demikian, bagian audit internal harus diisi oleh auditor yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kecakapan ilmu yang diperlukan dalam melakukan audit yang akurat.

Menurut Tugiman (2003, hal.23-29) kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh bagian audit internal adalah sebagai berikut :

1. Personalia

Bagian audit internal harus memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para auditor internal telah sesuai bagi audit yang akan dilaksanakan. beberapa hal yang harus diperhatikan bagian audit internal, yaitu :

- a. pimpinan audit internal harus menetapkan kriteria pendidikan dan pengalaman yang sesuai dalam mengisi jabatan di bagian audit internal, dengan mempertimbangkan lingkup pekerjaan dan tingkat tanggungjawabnya.
- b. Harus diperoleh kepastian yang pantas dan masuk akal tentang kualifikasi dan kemampuan setiap calon auditor.

2. Pengetahuan dan Kecakapan

Staf audit internal harus memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam melaksanakan audit dalam organisasi perusahaan. Misalnya dalam menentukan teknik-teknik audit, menerapkan standar audit, dan prosedur yang dijalankan. Untuk melaksanakan tugasnya maka, bagian audit internal sebaiknya memiliki berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan langkah akhir dari suatu kegiatan yang berguna untuk mempertahankan kondisi yang diharapkan. Pengawasan juga bagian daripada tanggungjawab kepala bagian audit internal.

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengisi jabatan di bagian audit internal, kriteria pendidikan dan juga pengalaman merupakan bahan pertimbangan bagi pimpinan audit internal guna

meminimalisir resiko human error dalam pelaksanaan audit karena kualitas personalia.

f. Tanggungjawab dan Kewenangan Audit

Informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit internal haruslah mempunyai pertanggungjawaban dan laporan tersebut meliputi kewenangan audit yang dimiliki. Maka daripada itu, bagian audit internal haruslah mempunyai deskripsi tugas, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab, dan alur kegiatan audit. Hal ini sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004, hal.8) dalam penelitian Kusumah (2008) tentang tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab audit internal :“tujuan, kewenangan, tanggungjawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi”

Dari kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan, kewenangan dan tanggungjawab audit internal di dalam organisasi perusahaan harus dinyatakan secara jelas dalam dokumen tertulis yang formal dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dokumen tersebut harus menjelaskan tujuan dari bagian Audit Internal khususnya ruang lingkup audit. Namun demikian, bagian Audit Internal tidak memiliki tanggungjawab atau kewenangan terhadap aktivitas yang diauditnya.

g. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup dari audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab dan beban. Ruang lingkup audit internal menurut Tugiman (2003, hal. 99-100) :

1. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhi.
3. Menelaah berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan barang-barang tersebut..
4. Menilai keekonomisan dan efisien sumber daya yang dipergunakan.
5. Menelaah operasi atau program untuk memastikan apakah hasil konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas (ruang lingkup audit internal) yaitu sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung-jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.

4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.

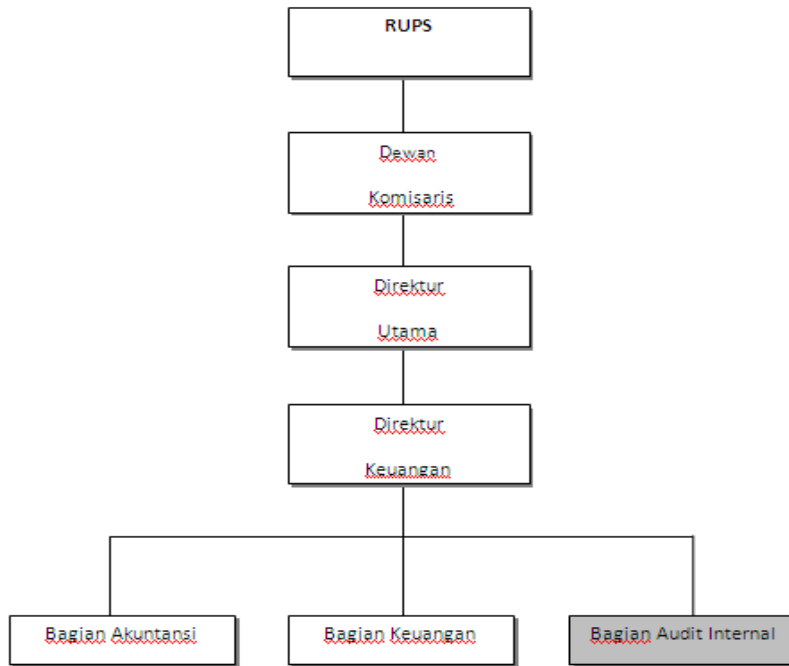
h. Kedudukan Audit Internal

Kedudukan audit internal dalam perusahaan akan menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan ataupun status audit internal dalam suatu perusahaan mempunyai peran terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari audit internal harus ditegaskan untuk dapat menyelesaikan tanggungjawab. (Sriwulandari, 2017)

Menurut Agoes (2013, hal.202) dalam penelitian Sriwulandari (2017) terdapat tiga alternatif kedudukan audit internal dalam perusahaan, yaitu :

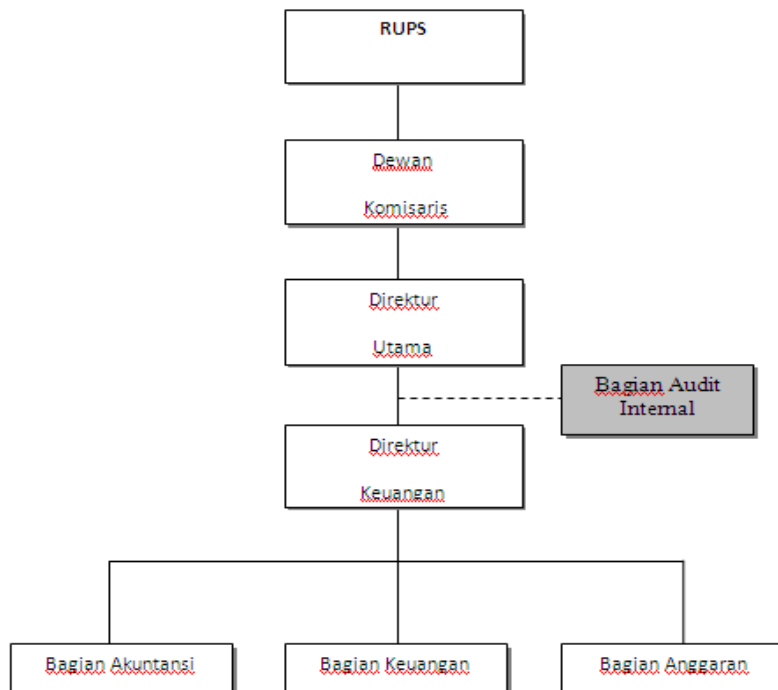
1. Audit internal berada dibawah direktur keuangan
2. Audit internal berada dibawah direktur utama
3. Audit internal merupakan staf dari staf dewan komisaris.

Kedudukan seorang auditor internal juga tidak memiliki wewenang langsung terhadap tingkat manajemen dalam organisasi perusahaan, kecuali pihak yang memang berada dibawahnya dalam audit internal itu sendiri. Kedudukan audit internal di dalam organisasi perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut :



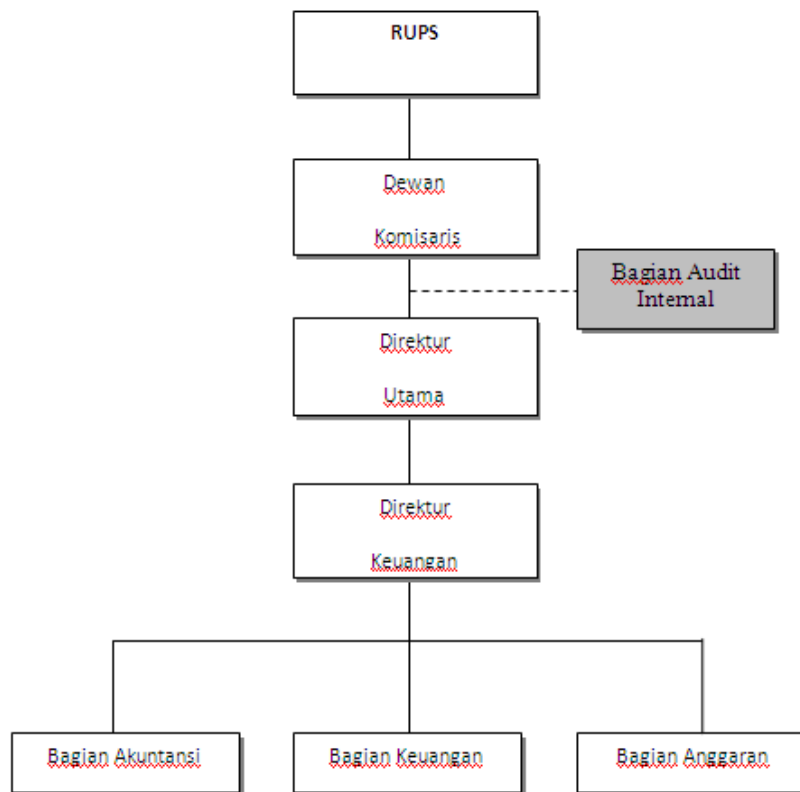
Gambar II - 1

Kedudukan Audit Internal dibawah Direktur Keuangan di dalam Organisasi Perusahaan



Gambar II - 2

Kedudukan Audit Internal dibawah Direktur Utama di dalam Organisasi Perusahaan



Gambar II - 3
Kedudukan Audit Internal Merupakan Staf dari Staf Dewan Komisaris
di dalam Organisasi Perusahaan

2. *Fraud* (Kecurangan)

a. Definisi *Fraud*

Fraud diterjemahkan sebagai penyimpangan, dimana penyimpangan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan dalam melakukannya.

Kecurangan (*Fraud*) Menurut Tuanakotta (2013, hal .28) yaitu :

any illegal act characterized by deceit, concealment, or threats of trust. These act are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Fraud are perpetrated by individual, and organization to obtain money, property, or service to avoid payment or loss of service, or to secure personal of business advantage.

Atau dapat diartikan bahwa kecurangan yaitu setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

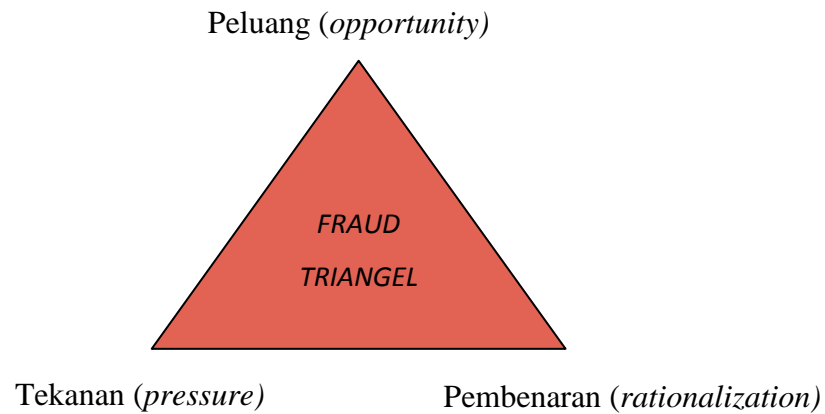
Sinaga (2008) menjelaskan bahwa *fraud* mencakup: “Penggelapan, manipulasi pelanggaran karena jabatan, pencurian, ketidakjujuran, kelakuan buruk, kelalaian, penggelapan pajak, penyuapan, pemerasan, penyerobotan, salah saji.”

ACFE mendefinisikan *fraud* (kecurangan) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan tindakan yang merugikan perusahaan dan juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang seharusnya di tindaklanjuti demi keberlangsungan hidup organisasi atau perusahaan.

b. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya *Fraud*

Penyebab terjadinya *fraud* menurut Tuanakotta (2013, hal.47-51) terdiri dari tiga kondisi umum yang hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu:



Gambar II – 4
Fraud Triangle

Karni (2000, hal. 38) menyatakan pendapat tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya pengendalian intern
 - a. Manajemen tidak menekankan perlunya peranan pengendalian intern
 - b. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan
 - c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadi *conflict interest*
 - d. Auditor internal tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki para eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar
2. Tekanan keuangan terhadap seseorang
 - a. Banyaknya uang
 - b. Pendapatan rendah
 - c. Gaya hidup mewah
3. Tekanan non finansial
 - a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan
 - b. Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan dengan bawahan

- c. Penurunan penjualan

4. Indikasi lainnya

- a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai
- b. Meremehkan integritas pribadi
- c. Kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal

Dari kutipan di atas, menggambarkan secara langsung bahwa *fraud* dapat terjadi karena memiliki penyebab. Maka seharusnya audit internal telah merancang prosedur audit secara matang untuk menutup peluang timbulnya penyebab terjadinya *fraud*.

c. **Red Flag**

Red flag merupakan tanda-tanda kecurangan (*fraud*) yang tercemin melalui karakteristik tertentu yang bersifat kondisi atau situasi tertentu yang merupakan peringatan dini terjadinya *fraud*. Menurut W. Steve Albrecht dalam bukunya *Fraud Examination* yang dikutip oleh Karyono (2013, hal. 95) ada enam jenis tanda-tanda *fraud* yaitu sebagai berikut:

1. Keganjilan Akuntansi

Keganjilan akuntansi (*accounting anomalies*) atau penyimpangan akuntansi karena adanya rekayasa dari pelaku, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat terdeteksi dari akuntansinya.

2. Kelemahan Pengendalian Intern

Pengendalian internal antara lain dirancang untuk dapat mengamankan harta milik organisasi. Bila pengendalian intern tidak dapat berfungsi efektif sebagai sarana kendali, kemungkinan besar terjadi *fraud*.

3. Penyimpangan Analisis

Memahami tanda-tanda fraud dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai analisis berupa:

- a. Analisis vertikal ialah analisis hubungan antar item-item dalam laporan keuangan (Neraca dan Laporan rugi laba dan Laporan arus kas) tahun lalu dengan tahun ini yang digambarkan dalam persentase.
- b. Analisis horizontal adalah analisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan.
- c. Analisis rasio adalah perbandingan item-item dalam laporan keuangan seperti rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio lancar (*current ratio*).
- d. Analisis rendemen adalah perbandingan antara hasil barang jadi dengan bahan bakunya.

4. Gaya Hidup Berlebihan

Tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya niat melakukan tindakan fraud. Setelah fraud berhasil, gaya hidup pelaku berubah menjadi berlebihan (*extravagant lifestyle*). Hal ini terlihat dari hasil penelitian tertutup (secara diam-diam) diperoleh kenyataan bahwa pelaku ternyata:

- a. Hidupnya sangat boros.
- b. Hidupnya konsumtif, suka membeli barang mewah dan mobil mewah padahal penghasilan resminya tidak memungkinkan untuk belanja seperti itu. Oleh karena itu, gaya hidup berlebihan merupakan tanda adanya fraud yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti.

5. Kelakuan Tidak Biasa

Kelakuan tidak biasa (*unusual behaviour*) atau perilaku menyimpang sebagai akibat rasa bersalah dan adanya rasa takut, sehingga kelakuan tidak biasa ini merupakan gejala terjadinya *fraud*.

6. Pengaduan

Pengaduan (*tip or complain*) atau adanya keluhan atas kegiatan atau pelayanan oleh organisasi atau pegawai hanya dianggap sebagai gejala karena pengaduan tersebut belum tentu benar. Pihak ketiga yang mengadu mungkin untuk memperoleh kepentingan individu semata, sedangkan karyawan yang mengadu karena iri hati atau masalah pribadi lain.

Dari uraian diatas, audit internal dapat melihat tanda-tanda *fraud* dari ketidakwajaran atau ketidaksesuaian kondisi dan situasinya dengan kenyataan yang seharusnya terjadi. Maka dengan adanya *red flag* audit internal semestinya dapat mendeteksi risiko *fraud*.

d. Klasifikasi *Fraud*

Menurut Karyono (2013, hal.11) klasifikasi *fraud* dapat ditinjau dari sudut/sisi sebagai berikut:

1. Kecurangan Ditinjau dari Sisi Korban Kecurangan

Kecurangan dari sisi korban dibedakan menjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian entitas organisasi dan kecurangan yang ditunjukkan untuk kepentingan entitas atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

- a. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi.

Kecurangan ini dapat dilakukan oleh pihak intern dan pihak ekstern organisasi dan merugikan bagi organisasi. Adapun kecurangan yang dilakukan oleh pihak intern dan ekstern organisasi antara lain:

- 1) Meningkatkan upah melalui penambahan karyawan fiktif.
- 2) Kecurangan pengadaan barang dengan mark up atau menggelembungkan harga.
- 3) Manipulasi dengan pengadaan barang atau jasa fiktif.
- 4) Kecurangan oleh leveransir, pemasok, kontraktor melalui pengiriman barang yang lebih kecil, atau mengganti barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan penagihan ganda.

- b. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Bentuk kecurangannya antara lain:

- 1) Merendahkan biaya atau kerugian
- 2) Meningkatkan penjualan atau keuntungan
- 3) Meningkatkan persediaan akhir
- 4) Merendahkan hutang para pemegang saham atau para kreditur
- 5) Merugikan pemerintah dari penerimaan pajak
- 6) Meningkatkan biaya dengan maksud mengelabui pihak fiskus dengan merendahkan laba kena pajak
- 7) Merugikan pemegang saham atau kreditur
- 8) Menipu pelanggan dengan menggunakan alat seperti timbangan pengukuran yang direndahkan
- 9) Merugikan pemberi kerja

10) Merendahkan penggunaan material pembangunan dalam jumlah dan kualitas

11) Meninggikan biaya dalam kontrak kerja

2. Kecurangan *Fraud* ditinjau dari Sisi Akibat Hukum yang Ditimbulkan.

Perbuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut akibat hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, kasus pidana khusus, dan kasus perdata. Kasus perdata karena ada pelanggaran perikatan dan adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, di pemerintahan akibat hukum perbuatan curang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan pembendaharaan.

3. Kecurangan Ditinjau dari Sisi Pelaku Kecurangan

Kecurangan dapat pula diklasifikasikan menurut perilaku kecurangannya yaitu kecurangan dari dalam organisasi (intern) dari luar organisasi (ekstern), dan melibatkan orang dalam dan orang luar organisasi (kolusi). Kecurangan oleh pelaku intern organisasi terdiri atas kecurangan manajemen dan kecurangan karyawan.

a. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)

Kecurangan manajemen antara lain berupa kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja perusahaan atau unit organisasi yang sengaja dilakukan oleh karyawan dalam peran manajerialnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut.

b. Kecurangan Karyawan (*Non-management Fraud*)

Non-management fraud merupakan tindakan-tindakan tidak jujur didalam suatu perusahaan atau organisasi yang dilakukan oleh karyawan walaupun manajemen telah menciptakan langkah-langkah dan usaha-usaha tertentu untuk mencegahnya. Kecurangan karyawan ini biasanya melibatkan perpindahan aktiva atau asset dari pemberi kerja, dan merupakan tindakan langsung dari pencurian atau manipulasi. Contohnya antara lain menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang digunakan pribadi karyawan, produknya disimpan atau dijual untuk kepentingan pribadi.

- c. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (Ekstern) Kecurangan dari pihak luar organisasi antara lain dilakukan oleh pemasok, levensir dan oleh kontraktor, dengan cara:
 - 1) Pengiriman barang yang lebih sedikit, dan penggantian barang dengan kualitas rendah.
 - 2) Penyerahan pekerjaan dengan kualitas rendah.
 - 3) Penagihan ganda atau penagihan lebih besar dari prestasi yang diberikan.
- d. Kecurangan yang Melibatkan Orang Dalam dan Orang Luar Organisasi
Kecurangan ini dilakukan melalui kerjasama yang tidak sehat (kolusi) atau persekongkolan antara orang dalam dan orang luar organisasi, seperti:
 - 1) Pimpinan instansi/ proyek pemerintah bersama kontraktor sepakat untuk menandatangani berita acara serah terima pekerjaan yang akan dijadikan dasar pembayaran lunas terhadap pekerjaan yang

tercantum dalam kontrak, padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai.

- 2) Pemberian kredit oleh bank-bank kepada debitur tertentu tanpa jaminan yang memadai, yang sengaja dilakukan sehingga sudah dapat dipastikan akan menjadi kredit macet dikemudian hari.

e. Bentuk-bentuk *Fraud*

Examination Manual 2006 dari Association of Certified Fraud Examiner yang dikutip oleh Karyono (2013, hal.17) mengemukakan bahwa fraud terdiri atas empat kelompok besar yaitu sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*) dan lebih buruk dari sebenarnya (*under statement*). Laporan keuangan overstated dilakukan dengan melaporkan asset dan pendapatan lebih besar dari yang sebenarnya. Kecurangan ini bertujuan:

- a. Meningkatkan nilai kekayaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan saham, karena nilainya naik.
- b. Untuk mendapatkan sumber pembiayaan atau memperoleh persyaratan yang lebih menguntungkan, dalam kaitannya untuk kredit perbankan atau kredit lembaga keuangan lainnya.
- c. Untuk menggambarkan rentabilitas atau perolehan laba yang lebih baik.
- d. Untuk menutupi ketidakmampuan dalam menghasilkan uang/kas.
- e. Untuk menghilangkan persepsi negatif pasar

f. Untuk memperoleh penghargaan/bonus karena kinerja perubahan baik.

2. Kecurangan Penyalahgunaan Aset

Kecurangan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) terdiri atas kecurangan kas dan penyalahgunaan persediaan dan aset lainnya.

a. Kecurangan Kas

Kecurangan penerimaan kas terdiri atas kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat (*Skimming*), kecurangan kas setelah dicatat (*Larceny*), dan kecurangan pengeluaran kas (*Fraudulent Disbursement*) termasuk kecurangan penggantian biaya (*Expense Disbursement Scheme*).

b. Penyalahgunaan Persediaan dan Aset Lain (*Inventory and other Assets Misappropriation*)

Kecurangan persediaan barang dan aset lainnya terdiri dari pencurian (*larceny*) dan penyalahgunaan (*misuse*). Larceny scheme dimaksudkan sebagai pengambilan persediaan/ barang di gudang karena penjualan atau pemakaian untuk perusahaan tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau catatan gudang.

3. Korupsi

Kata korupsi (*corruption*) berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kebenaran. Pengertian korupsi bervariasi, namun secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Korupsi terjadi pada organisasi korporasi swasta dan pada sektor publik/pemerintah.

Adapun bentuk korupsi tersebut terdiri atas hal-hal berikut ini :

a. Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Bentuk korupsi ini terjadi ketika karyawan atau manajer mempunyai kepentingan pribadi pada suatu kegiatan atau transaksi bisnis pada organisasi dimana ia bekerja, kepentingan tersebut berlawanan dengan kepentingan organisasinya.

b. Suap (*Bribery*)

Suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya. Sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa uang, pelunasan hutang, hiburan, fasilitas, keuntungan bisnis, janji-janji manis, pinjaman, dan sebagainya.

c. Pemberian tidak sah (*Illegal Grativities*)

Pemberian tidak sah adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada seseorang karena keputusan yang diambil oleh seseorang. Keputusan itu berdampak memberi keuntungan kepada pemberi sesuatu yang bernilai tersebut.

d. Pemerasan Ekonomi (*Economic Extortion*)

Pada bentuk korupsi ini, karyawan minta bayaran dari rekanan (*vendor*) atas keputusan yang diambil yang menguntungkan rekanan

(*vendor*) tersebut. Caranya dengan jalan menakut-nakuti, dengan ancaman atau bujukan.

4. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer

Kecurangan yang berkaitan dengan computer antara lain :

- a. Perusakan computer.
- b. Pencarian informasi dan harta kekayaan.
- c. Kecurangan keuangan atau pencurian kas.
- d. Penggunaan atau penjualan jasa komputer secara tidak sah

Dari Uraian diatas, dijelaskan bentuk-bentuk dari *fraud* yang terjadi sehingga dapat dikelompokkan jika ada penemuan dari hasil kegiatan audit internal perusahaan. Setiap bentuk *fraud* yang dilakukan pelaku *fraud* berbeda-beda, tetapi semuanya berakibat pada satu pusat yaitu kerugian bagi perusahaan.

4. Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* merupakan tanggungjawab manajemen, audit internal bertanggungjawab untuk menguji dan menilai kecukupan serta efektivitas tindakan manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, audit internal harus melakukan audit sesuai dengan prosedur, memonitor gejala-gejala *fraud*, melakukan penelusuran untuk mencegah *fraud*, dan mengidentifikasi semua *fraud* yang mungkin terjadi.

Menurut Amrizal (2004) tujuan audit internal adalah untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan

yang di audit. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal;
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen;
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan;
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya;
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen;
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tersebut dapat disimpulkan bahwa internal auditor antara lain memiliki peranan dalam:

- a. Pencegahan Kecurangan (*Fraud Prevention*),
- b. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*), dan
- c. Penginvestigasian Kecurangan (*Fraud Investigation*).

Dikutip dari Kusumah (2008) atas penelitian Arif dan Satyo (2000, hal. 42) menyatakan bahwa “*fraud* jelas-jelas menimbulkan kerugian sangat besar bagi perusahaan atau organisasi. Untuk itu, perlu diambil tindakan agar terhindar atau paling tidak mengurangi aktivitas *fraud* tersebut”.

Menurut Amrizal (2004) kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara –cara berikut :

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian
3. Meningkatkan kultur organisasi

4. Mengefektifkan fungsi internal audit

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen harus mengambil keputusan atau kebijakan khusus untuk mencegah terjadinya *fraud* di dalam perusahaan. Diantaranya penting bagi perusahaan memiliki kebijakan *internal control* untuk mengendalikan resiko *fraud*.

Unsur pengendalian intern dikutip oleh Mulyadi (2013) dalam Standar Audit Seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit laporan keuangan paragraph 07 menyebutkan 5 unsur pokok pengendalian internal yaitu :

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)
2. *Risk Assesment* (Penaksiran Resiko)
3. *Information dan Communication* (Informasi dan Komunikasi)
4. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)
5. *Monitoring* (Pemantauan)

Dari kutipan tersebut, akan dijelaskan lebih rinci mengenai penjelasan unsur pengendalian internal.

a. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsure pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain :

1. Integritas dan nilai-nilai etika

beragam cara yang ditempuh oleh manajemen tingkat atas untuk menekankan tentang pentingnya integritas dan nilai etika di antara para personilnya dalam perusahaan, misalnya dengan memberikan contoh yang baik, berkomunikasi dengan baik kepada para karyawan, memberikan pedoman moral, dan mengeliminasi insentif dan rangsangan lainnya.

2. Komitmen dan kompetensi

Merupakan kesadaran manajemen akan campuran intelegensi, pelatihan ,dan pengalaman setiap karyawan yang diperlukan dalam mengembangkan potensi mereka.

3. Dewan komisaris dan komite audit

Dewan direktur bertanggungjawab untuk memastikan bahwa manajemen memenuhi tanggungjawabnya untuk menetapkan dan mempertahankan internal control, sedangkan komite audit bertanggungjawab untuk mengenali penolakan manajemen atas pengendalian atau kecurangan dalam laporan keuangan dan menindaklanjuti hal tersebut secara tepat.

4. Filosofi dan gaya operasi manajemen

Manajemen mempunyai peran yang besar dalam memberikan lingkungan pengendalian yang baik dalam suatu organisasi. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan.

5. Struktur organisasi

Menggambarkan garis hubungan wewenang dan pertanggungjawaban sehingga dapat memberikan kontribusi bagi lingkungan pengendalian baik

dalam hal memberikan kerangka (framework) secara menyeluruh bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi.

6. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab

Merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi dengan pembagian wewenang yang jelas sehingga organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi.

7. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

Berupa kemampuan menyediakan karyawan yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan pada bidangnya masing-masing. Ini dapat mengurangi unsur pengendalian intern yang lain sampai batas minimum.

b. *Risk Assesment* (Penaksiran Resiko)

Penaksiran risiko melibatkan proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti :

- a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.
- b. Perubahan standar akuntansi
- c. Hukum dan peraturan baru
- d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi system dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.
- e. Pertumbuhan pesat entitas yang menurut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut.

c. *Information dan Communication (Informasi dan Komunikasi)*

Sistem akuntansi yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengikhtisarkan, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas merupakan bentuk komunikasi entitas kepada semua pengguna laporan tersebut. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan system akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah :

- a. Sah
- b. Telah diotorisasi
- c. Telah dicatat
- d. Telah dinilai secara wajar
- e. Telah digolongkan secara wajar
- f. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya
- g. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar

d. *Control Activities (Aktivitas Pengendalian)*

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap

pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian pengolahan informasi

Banyak perusahaan sekarang menggunakan komputer untuk pengolahan informasi umumnya dan terutama informasi akuntansinya. Pengendalian pengolahan informasi dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pengendalian umum

Unsur pengendalian umum ini meliputi: organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian

- b. Pengendalian aplikasi

Pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus setiap aplikasi.

Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan berikut ini :

1. Menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap.
2. Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti.
3. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan.
4. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan.
5. Menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi.

Pengendalian aplikasi terhadap pengolahan transaksi tertentu dikelompokkan menjadi :

1. Prosedur otorisasi yang memadai.

Setiap transaksi yang terjadi didasari atas persetujuan atau otorisasi dari yang memiliki wewenang. Missal dalam pelaksanaan transaksi pembelian, prosedur otorisasi diatur sebagai berikut:

a. Kepala fungsi pembelian : berwenang memberikan otorisasi atas surat *order* pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian. Apabila kepala fungsi akuntansi telah menyetujui atau mengotorisasi, maka barang dan jasa yang dibeli adalah yang diperlukan oleh perusahaan.

b. Kepala fungsi penerimaan : berwenang memberikan otorisasi pada laporan penerimaan barang yang diterbitkan oleh fungsi penerimaan. Apabila kepala fungsi penerimaan telah menyetujui atau mengotorisasi, maka barang yang diterima adalah barang yang dipesan, dan sesuai dengan pembelian.

c. Kepala fungsi akuntansi : berwenang memberikan otorisasi pada bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar pencatatan terjadinya transaksi pembelian. Apabila kepala fungsi akuntansi telah menyetujui atau mengotorisasi, maka utang yang dicatat adalah kewajiban perusahaan atas barang atau jasa yang dibeli dan diterima oleh perusahaan.

2. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup

Dalam perancangan dokumen dan catatan, unsure pengendalian intern yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Perancangan dokumen bernomor urut tercetak.

2. Pencatatan transaksi harus dilakukan pada saat transaksi terjadi, atau segera setelah transaksi terjadi. Jika jarak pencatatan dengan transaksi semakin jauh maka semakin berkurang keandalannya dan kemungkinan kesalahannya semakin tinggi.
3. Perancangan dokumen dan catatan harus cukup sederhana untuk menjamin kemudahan dalam pemahaman terhadap dokumen dan catatan tersebut.
4. Dipastikan sedapat mungkin dalam satu dokumen dirancang untuk mencatat berbagai keperluan sekaligus.
5. Perancangan dokumen dan catatan berisi instruksi yang jelas tentang cara pengisian agar mendorong pengisian data yang benar.

3. Pengecekan secara independen

Pada proses ini, kunci penting yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi intern adalah independensi karyawan yang melaksanakan verifikasi tersebut. Maka setidaknya untuk menjamin independensi, verifikasi kinerja tidak boleh dilaksanakan oleh karyawan yang memiliki kedudukan di bawah karyawan yang diverifikasi kinerjanya.

2. Pemisahan fungsi yang memadai

Tujuan pokok pemisahan fungsi adalah untuk mencegah dan untuk dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang.

Pembagian tugas di dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini

- a. Pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi akuntansi
- b. Pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan aktiva yang bersangkutan.
- c. Pemisahan fungsi otorisasi dari fungsi akuntansi.

Pemisahan fungsi dilakukan untuk membagi berbagai tahap transaksi ke tangan manajer berbagai fungsi yang dibentuk, sehingga semua tahap transaksi tidak diselesaikan oleh satu fungsi saja.

3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan

Untuk melindungi fisik atas kekayaan dan catatan sudah pastinya dengan menyediakan perlindungan secara fisik. Jika semakin penting atau berharganya suatu kekayaan atau catatan maka juga semakin besar perlindungan fisik yang dilakukan. Misalnya penyimpanan atas mesin-mesin sebaiknya disimpan dengan suhu, cuaca, dan tempat yang sesuai dengan anjuran penyimpanannya.

4. *Review* atas kinerja

Review atas kinerja mencakup *review* dan analisis yang dilakukan oleh manajemen atas :

- a. Laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam akun buku pembantu, seperti daftar umur piutang usaha, laporan penjualan menurut daerah pemasaran, wiraniaga, produk, dan *customer*.
- b. Kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, prakiraan, atau jumlah tahun yang lalu.
- c. Hubungan antara serangkaian data, seperti data keuangan dengan data nonkeuangan.

e. *Monitoring (Pemantauan)*

Pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi berkesinambungan(terus menerus) dibangun ke dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas menyajikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektifitas evaluasi yang sedang berlangsung, bahan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi.

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan seharusnya dilakukan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat, guna menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan yang selalu dinamis.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian internal telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan dan pengolahan data yang dilaksanakan. Penelitian tersebut diantaranya :

Tabel II – 1
Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul Penelitian | Metodologi | Hasil Penelitian |
|---|---|------------|---|
| Ihsan Kusumah (2008) | Peranan Audit Internal dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pada PT. Bank Jabar Banten | Deskriptif | Menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal di Kantor Cabang Utama PT. Bank Jabar Banten sudah memadai dan dapat disimpulkan audit internal bermanfaat dalam pencegahan <i>fraud</i> . |
| Intan Riana Anggraeni (2010) | Peranan Audit Internal dalam Pencegahan <i>Fraud</i> pada PT. Pos Indonesia (Bandung) | Deskriptif | Menunjukkan adanya peranan audit internal yang signifikan dalam pencegahan <i>fraud</i> . |
| Mimin Widaningsih dan Desy Nur Hakim (2015) | Pengaruh Profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan dan pendeteksian <i>fraud</i> | Asosiatif | Menunjukkan bahwa besarnya pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan pendeteksian <i>fraud</i> sebesar 40,07% dan 37,33%. |
| Suginam (2017) | Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> | Asosiatif | Menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian internal perusahaan sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk |

| | | | |
|----------------------|--|------------|---|
| | | | mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan <i>fraud</i> |
| Sri Wulandari (2017) | Peranan Audit Internal dalam Pelaksanaan Pengendalian Internal pada PDAM Tirtanadi Sumut | Deskriptif | Menunjukkan bahwa peranan audit internal belum berjalan dengan efektif. |

C. Kerangka Pemikiran

Audit internal sangat penting bagi perusahaan untuk membantu manajemen mencapai kinerja perusahaan yang baik dan ditujukan untuk membantu memperbaiki kinerja perusahaan serta menjaga keamanan harta perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dari harta kekayaan tersebut, maka untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan salah satunya yaitu independensi pada audit internal. Dalam SPAP 2001 menyatakan bahwa independensi yaitu tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Selain dari pada independensi, kemampuan profesional dari auditor internal juga dibutuhkan. Menurut Tugiman (2003, hal. 23-29) kemampuan profesional yang harus dimiliki audit internal diantaranya personalia, pengetahuan dan kecakapan, serta pengawasan. Di dalam kemampuan profesional tersebut mewakili unsur-unsur yang dapat melaksanakan kegiatan audit internal secara efektif.

Kemampuan profesional dibarengi dengan tanggungjawab dan kewenangan audit seperti deskripsi tugas, tujuan, dan alur kegiatan audit yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam berperan menjalankan tugas audit internal.

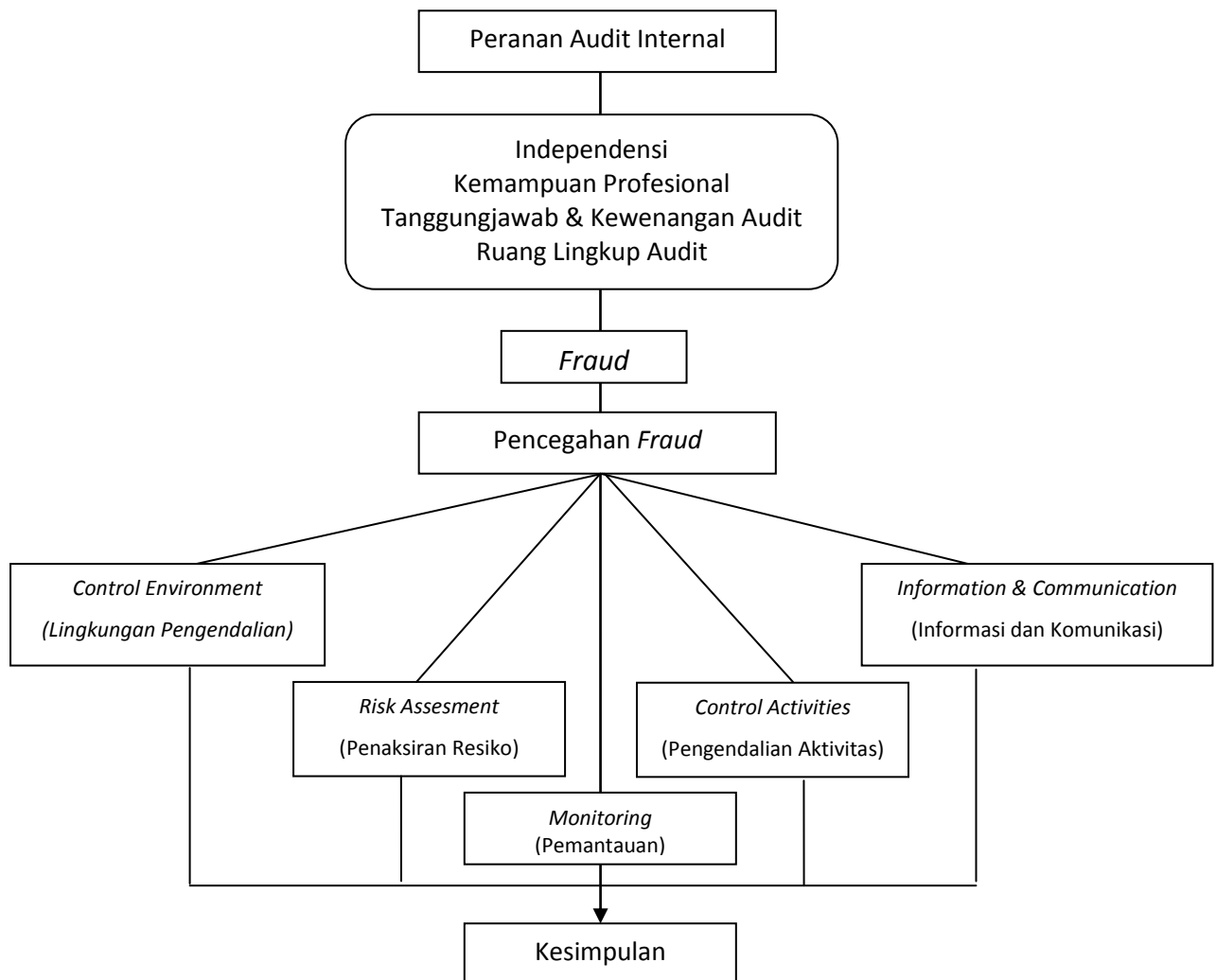
Setelah atribut yang harus dimiliki auditor internal telah memadai maka pelaksanaan kegiatan audit juga memiliki lingkup untuk dapat mengukur kinerja audit internal. Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab.

Seperti yang diungkapkan pada latar belakang masalah penelitian ini, audit internal diperlukan keberadaannya salah satunya untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan atau *fraud*. Sinaga (2008) menjelaskan *fraud* mencakup penggelapan, manipulasi pelanggaran karena jabatan, pencurian, ketidakjujuran, kelakuan buruk, kelalaian, penggelapan pajak, penyuapan, pemerasan, penyerobotan, salah saji. Jika dibagi berdasarkan jenisnya maka *fraud* terbagi atas kecurangan Laporan Keuangan (*fraudulent statement*), penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*). Adapun faktor pendorong terjadinya *fraud* menurut Tuanakotta (2013, hal. 47-51) terdiri dari tiga kondisi yaitu peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan pembenaran (*rationalization*).

Maka respon atas *fraud* yang terjadi maka dibentuklah audit internal sesuai dengan fungsinya sebagai bentuk pengawasan dan berupaya untuk menghilangkan dan mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut (Amrizal, 2004). Meskipun upaya pencegahan terjadinya kecurangan sepertinya bukan suatu hal yang mudah, tetapi upaya tersebut sebaiknya dilaksanakan untuk menghindari atau paling tidak mengurangi tindakan *fraud* tersebut.

Kebijakan *internal control* untuk mengendalikan resiko *fraud* penting dalam perusahaan, dan didalam *Commite Of Sponsoring Organization (COSO)* telah diatur tentang pengendalian internal. Adapun komponen-komponen pengendalian internal menurut Mulyadi (2013) yaitu *control environment* (lingkuan pengendalian), *risk assessment* (penaksiran resiko), *contol activities*(Aktivitas Pengendalian), *information and communication* (informasi dan komunikasi), *monitoring* (pengawasan).

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II - 5
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian berbentuk deskriptif yaitu penelitian untuk membuat deskripsi, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, maka oleh karena itu penelitian ini termasuk dalam pendekatan deskriptif. Menurut Ikhsan (2014, hal. 18) paradigma kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, maka oleh karena itu penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

B. Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka penulis mengemukakan bahwa definisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Peranan Audit Internal

Menurut Sawyer's (2002, hal 10) yang diterjemahkan oleh Sriwulandari (2017) menjelaskan bahwa audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat di andalkan, risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir, peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa di terima telah diikuti,

kriteria operasi yang memuaskan telah di penuhi, sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomi, dan tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditelusuri apakah peran audit internal yang didalamnya memiliki prinsip etika profesi dapat mencegah tindakan *fraud*.

2. Pencegahan *Fraud*

Dikutip dari Kusumah (2008) atas penelitian Arif dan Satyo (2000, hal. 42) menyatakan bahwa “*fraud* jelas-jelas menimbulkan kerugian sangat besar bagi perusahaan atau organisasi. Untuk itu, perlu diambil tindakan agar terhindar atau paling tidak mengurangi aktivitas *fraud* tersebut”.

Pentingnya audit internal dalam perusahaan ialah yang memiliki kebijakan *internal control* untuk mengontrol dan mencegah tindakan *fraud*. Menurut Mulyadi (2013) unsur-unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, pengendalian pengolahan informasi, pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan, *review* atas kinerja, dan pemantauan.

Berdasarkan uraian tersebut dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari adanya penerapan pengendalian internal dapat ditelusuri guna mendapatkan keterangan bahwa apakah peran audit internal dapat mencegahnya tindakan *fraud* .

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara si peneliti dengan responden, dimana data ini memerlukan pengolahan lebih lanjut. Ikhsan (2014, hal. 122)
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Ikhsan (2014, hal. 122)

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Contohnya wawancara rutinitas kegiatan audit, standar yang diterapkan dalam melakukan audit dan permasalahan yang sedang dialami. (Kisi-kisi wawancara terlampir)

2. Dokumentasi

Yaitu berupa penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Contohnya data deskripsi tugas (jobs description), Struktur organisasi, ICQ audit internal, temuan kasus *fraud* dan program audit yang diterapkan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah [masalah](#) tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan wawancara dan meminta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada bagian SPI pada perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh.
2. Peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh penulis dari hasil data wawancara dan dokumentasi dari perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh.
3. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dan membandingkan dengan teori yang ada dan menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Perusahaan

Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantor Pos pertama didirikan tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jena G.W Baron van Imhoff. Tujuan didirikannya adalah untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Status Pos Indonesia (Persero) pada awal kemerdekaan dikenal dengan jawatan PTT (Pos Telegraph and Telephone), dan berstatus perusahaan negara. Kantor Pusat PTT yang semula berkedudukan di Weltvreden (Gambir) dipindahkan ke gedung BOW (Budjgerlijke Openbare Warcken) di Bandung pada Tahun 1923.

Jawatan PTT selama masa pendudukan Jepang terpecah-pecah sesuai dengan struktur organisasi pemerintah Militer Jepang, sehingga pada masa itu terdapat Jawatan Sumatera, Jawatan PTT Jawa dan Jawatan PTT Sulawesi. Pada tanggal 27 September 1945. Kekuasaan atas Jawatan PTT direbut dari Jepang oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT).

Dalam perkembangannya, Jawatan PTT sebagai suatu perusahaan Indische bedrijven Wet (BOW) dinyatakan telah memenuhi syarat untuk

dijadikan perusahaan Negara (NO) sesuai dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 19 Tahun 1960. Maka dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 240 Tahun 1961 status Jawatan PTT diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL).

Seiring dengan pesatnya perkembangan lapangan usaha kegiatan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, pada Tahun 1965 PN POSTEL dikembangkan menjadi dua perusahaan yakni, PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969, Status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan menjadi Perjan, Perum dan Persero. Atas dasar itu, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 yang mengubah status PN Pos dan Giro menjadi Perum terhitung mulai tanggal 9 Maret 1978.

Adapun sifat, maksud dan tujuan Perusahaan Umum Pos dan Giro seperti termasuk dalam BAB III Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perum Pos dan Giro adalah Sebagai berikut :

1. Sifat dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan sekaligus keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
2. Maksud perusahaan adalah menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan

dan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Tujuan Perusahaan adalah membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan pos dan giro dalam arti seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional.

b. Visi dan Misi PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Medan

- *To be the postal logistic giant from the east.*
Menjadi raksasa logistic pos dari Timur.
- *To be a valuable asset for the nation and its people*
Menjadi asset yang berguna bagi bangsa dan Negara
- *To be joyful place of work*
Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan
- *To be the best choice for the customers*
Menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan
- *Constantly striving to provide a better service for the nation, its people, our customers, employees, the society and shareholders.*
Senantiasa berjuang untuk member lebih baik bagi bangsa, Negara, pelanggan, karyawan, masyarakat, serta pemegang saham.

2. Audit Internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh

Peran audit internal sangat diperlukan untuk melakukan control dan pengawasan terhadap aktifitas pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Bagian Audit Internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh yang dijabat dengan sebutan Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas dan bertanggungjawab sesuai dengan Panduan Satuan Pengawasan Intern PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu :

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Audit Tahunan.
- b. Melaporkan Realisasi Kerja dan Anggaran Audit Tahunan secara berkala setiap Triwulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- d. Memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif tentang kegiatan Auditee pada semua tingkat manajemen untuk peningkatan kinerja perusahaan.
- e. Memberikan konsultasi kepada pihak internal perusahaan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian internal, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.

- f. Melakukan audit pendalaman (khusus) apabila diperlukan dan atau atas permintaan Manajemen dalam bentuk audit dengan tujuan tertentu dan atau audit investigasi.
- g. Menyusun dan melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan atau pimpinan unit kerja terkait (auditee).
- h. Melaporkan segera atas setiap temuan audit (Management Letter) yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan.
- i. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- j. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar dan kode etik.
- k. Melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan dan sesuai dengan kompetensi Auditor.
- l. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kehandalan, efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal perusahaan di unit kerja termasuk pelaksanaan tugas khusus dari Direktur Utama. (sistem operasional pengawasan).
- m. Dalam menjalankan tugas dan fungsi SPI bekerja sama dengan Komite Audit.

Setelah peneliti menganalisa dan mewawancarai narasumber pada bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI), proses audit internal yang diterapkan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh yaitu audit internal berbasis risiko, Proses audit internal berbasis risiko akan melalui tahapan-tahapan yakni:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan meliputi kegiatan pembuatan rencana tahunan yang biasa disebut dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan rencana pemeriksaan individual atas satuan layak audit (auditable units). Perencanaan audit berbasis risiko merupakan upaya audit intern dalam rangka melaksanakan perannya untuk membantu manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan utama perencanaan audit berbasis risiko adalah menentukan alokasi kegiatan audit agar lebih terarah pada area yang memiliki risiko besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Persiapan audit dilakukan dalam bentuk *Office Review*, dilakukan sebelum audit dilaksanakan pada objek yang diaudit yang bertujuan untuk :

- a) Memahami keadaan, sifat dan jenis kegiatan objek yang diaudit dengan baik melalui penelaahan/analisis atas catatan/laporan keuangan dan informasi lainnya.
- b) Mengetahui sejauh mana rekomendasi audit sebelumnya telah ditindak lanjuti berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut.
- c) Menyusun identifikasi sasaran audit dan penilaian risiko.

d) Menetapkan Program Audit dan Internal Control Questioner (ICQ).

2. Tahap Pekerjaan Lapangan (Pengujian).

Tahap pekerjaan lapangan disebut juga dengan tahap pengujian. Tahap ini merupakan tahap pokok dari suatu audit karena pada tahap ini diharapkan akan diperoleh hasil audit (temuan) guna perbaikan pengendalian manajemen dan operasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pada tahap ini diperlukan berbagai metode pengujian untuk mencapai tujuan audit. Langkah pengujian dan evaluasi sebaiknya ditetapkan oleh Tim Pemeriksa pada saat dilakukan perencanaan audit sehingga para pemeriksa hanya melaksanakan langkah kerja yang sudah ditetapkan.

Tahapan pelaksanaan audit meliputi : Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pembahasan dan Tanggapan Objek yang diaudit.

a) Persiapan audit, terdiri dari :

Pembahasan pendahuluan dengan pimpinan objek yang diaudit, pada tahap ini auditor menjelaskan tujuan audit dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan audit yang akan dilakukan, dengan demikian objek yang diaudit betul-betul dapat memahami tugas dan kewajiban Auditor selama pelaksanaan audit.

Mendapatkan informasi umum yang belum diperoleh saat *Office Review* mengenai semua aspek yang berhubungan dengan kegiatan objek yang diaudit, informasi umum ini diperlukan agar Auditor dapat mengetahui

aspek-aspek penting yang berhubungan dengan kegiatan objek yang diaudit, seperti :

1. Struktur organisasi beserta uraian tugas objek yang diaudit.
2. Ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku bagi objek yang diaudit.
3. Kebijakan-kebijakan yang berlaku.
4. Metode/prosedur operasi dan administrasi yang diterapkan pada objek yang diaudit.
5. Data keuangan termasuk hasil penelitian analisis atas laporan keuangan tahun berjalan.
6. Masalah-masalah penting yang belum terpecahkan, sebagaimana telah dikemukakan oleh pimpinan objek yang diaudit dalam pembahasan pendahuluan.

b) Pelaksanaan Audit.

Proses pelaksanaan audit diuraikan sebagai berikut :

1. Supervisor / Ketua Tim beserta Anggota Tim melaksanakan prosedur audit sesuai dengan program audit. Bila perlu Supervisor / Ketua Tim dapat melakukan perubahan program audit dengan terlebih dahulu mengemukakan alasan-alasan perubahan tersebut kepada Penanggung Jawab Audit.
2. Hasil pelaksanaan audit dituangkan dalam Kertas Kerja Audit (KKA). Supervisor /Ketua Tim wajib menelaah KKA yang dibuat oleh

anggotanya dan seluruh KKA dapat ditelaah kembali oleh Penanggung Jawab Audit.

3. Penanggung Jawab Audit secara berkala mengawasi jalannya audit yang dilakukan oleh Tim Audit, serta memberikan pengarahan baik secara lisan maupun tertulis.
4. Setelah semua program audit dilaksanakan secara lengkap dan KKA telah ditelaah seluruhnya, Supervisor / Ketua Tim membuat konsep LHA. Konsep LHA tersebut beserta KKA pendukungnya diserahkan oleh Ketua Tim kepada Supervisor.
5. Pada saat pelaksanaan audit, Supervisor / Ketua Tim bersama-sama dengan anggotanya harus menelaah dan menilai sistem pengendalian intern dari jawaban ICQ yang diterima.
6. Jika dalam proses audit terdapat temuan yang harus segera ditindaklanjuti maka dibuat Memo Audit yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan atau Supervisor.
7. Apabila Memo Audit tidak segera ditindaklanjuti oleh objek audit, maka dibuatkan *Management Letter* yang ditandatangani oleh Ka.SPI.

c) Pembahasan Temuan dan Tanggapan Objek yang diaudit.

Bila audit lapangan telah selesai, Auditor perlu melaksanakan langkah-langkah berikut ini sebelum meninggalkan objek yang diaudit :

1. Melakukan pembahasan mengenai temuan hasil audit dengan pimpinan objek yang diaudit yang meliputi nama risiko, penyebab dan akibat risiko yang ditemukan, tingkat risiko dan pemetaan risiko.
2. Membuat kesepakatan mitigasi risiko untuk menurunkan tingkat risiko dan komitmen waktu tindak lanjut mitigasi hasil audit tersebut.
3. Pemantauan Tindak Lanjut Mitigasi Hasil Audit

Pemantauan tindak lanjut atas Mitigasi risiko merupakan fungsi audit untuk meyakini apakah komitmen mitigasi risiko telah dilaksanakan atau belum. Penjelasan lebih lanjut atas pemantauan tindak lanjut hasil audit dapat dilihat pada Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit.

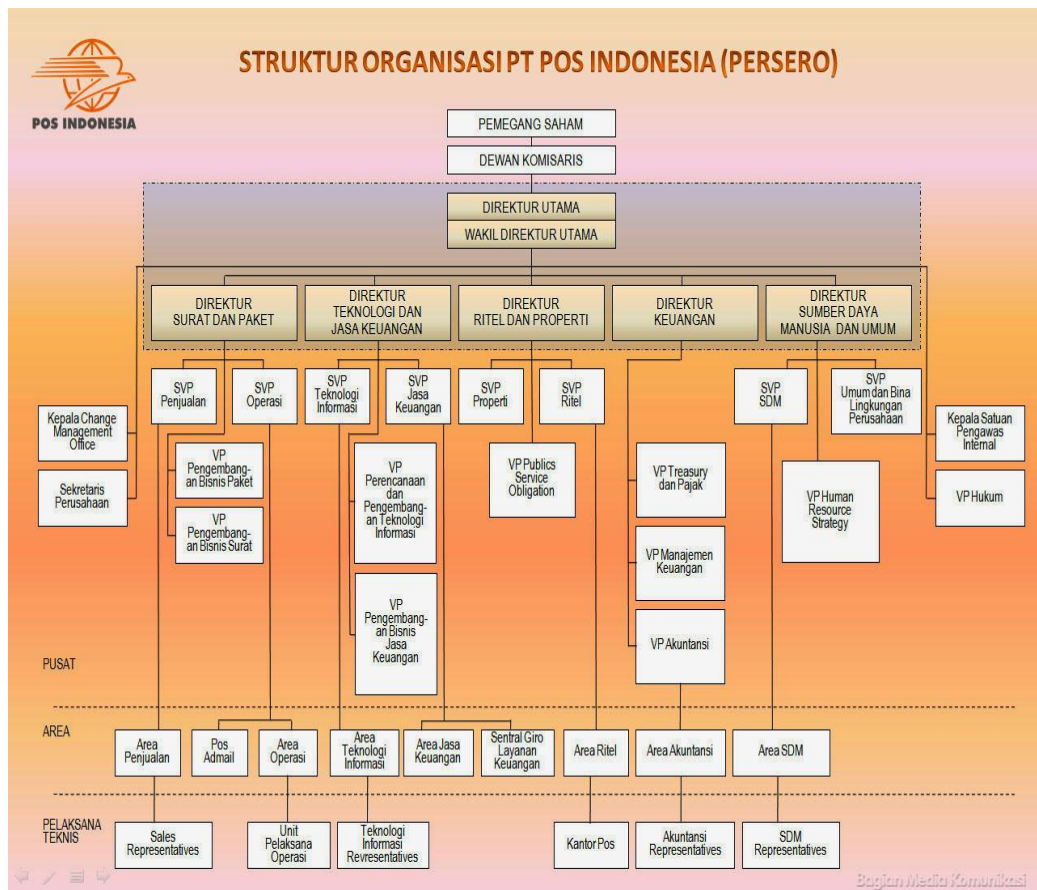
3. Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh

Untuk mencegah terjadinya risiko *fraud*, maka harus dibangun pengendalian intern yang baik agar dapat membentengi perusahaan dari peluang-peluang yang dapat menimbulkan kecurangan (*fraud*). Setelah peneliti melakukan analisa dan mewawancarai beberapa pegawai pada bagian yang berkaitan dalam penelitian termasuk bagian SPI maka dapat dijelaskan pengendalian intern pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian

1. Struktur Organisasi

Untuk mempermudah arus kerja perusahaan serta menjamin pendelegasian tanggungjawab dan wewenang pekerjaan, maka diperlukan struktur organisasi dimana juga harus memiliki kekuatan sebagian dari bentuk pengendalian agar tetap pada tujuannya yaitu sebagai wadah atas kerja sama yang baik dari setiap divisi agar sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lengkapnya tujuan daripada struktur organisasi yaitu untuk menjelaskan tanggungjawab, kedudukan, jalur hubungan, dan uraian tugas anggota organisasi.



Gambar IV – 1

2. Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab

Tahapan ini merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Pada *job description* atau uraian tugas perwakilan SPI Regional I Medan dijelaskan fungsi dan tugas serta tanggungjawab setiap anggota yang menjabat sebagai berikut :



JOB DESCRIPTION (URAIAN TUGAS) PERWAKILAN SPI REGIONAL I MEDAN **KAPER SPI-I (LAODE SETIYADI BASRI 965291730)**

Fungsi :

Pengelolaan kegiatan audit internal di Wilayah Kerja Regional I sesuai Program Kerja (PKAT) yang telah ditetapkan oleh Ka. SPI Pusat dan dilaksanakan sesuai standar audit internal yang telah didokumentasikan dalam Pedoman Tata Kerja SPI, Pedoman Audit Keuangan dan Operasi, Pedoman Audit Investigasi dan Pedoman Pemantauan Tindak lanjut.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Merumuskan sasaran dan program audit internal lingkup UPT di wilayah kerja Regional-I secara keseluruhan untuk mendapat persetujuan dan penetapan Ka.SPI Pusat.
2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan
3. Menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang
4. Mengajukan anggaran pelaksanaan audit kepada Ka. SPI Pusat
5. Mengoreksi dan menyetujui usulan dan Rencana Audit yang dibuat staf.

Gambar IV – 2



JOB DESCRIPTION (URAIAN TUGAS) PERWAKILAN SPI REGIONAL I MEDAN **WAKAPER SPI-I (JAFAR NIPPOS 967222084)**

Fungsi :

Membantu Kaper dalam pengelolaan kegiatan audit di Wilayah Kerja Regional I sesuai program kerja (PKAT) yang telah ditetapkan oleh SPI Pusat dan dilaksanakan sesuai standar audit internal yang telah didokumentasikan dalam Pedoman Tata Kerja SPI, Pedoman Audit Keuangan dan Operasi, Pedoman audit investigasi dan Pedoman pemantauan tindak lanjut.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Mempersiapkan rencana audit rutin.
2. Menyusun pembagian tugas audit sesuai bidang keahlian.
3. Mengajukan anggaran pelaksanaan audit kepada Kaper.
4. Memeriksa pembuatan panjar dan kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan audit (surat pemberitahuan, surat tugas, audit program dll).
5. Memeriksa semua biaya operasional SPI-I termasuk biaya pengembangan.

Gambar IV – 3



JOB DESCRIPTION (URAIAN TUGAS) PERWAKILAN SPI REGIONAL I MEDAN
AUDITOR (KASNO NIPPOS 965268949)

Fungsi :

Melaksanakan audit di Bidang tertentu sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Kepala Perwakilan SPI 1 dengan berpedoman kepada standar audit internal

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Mempersiapkan Surat Tugas, SPPD dan yang terkait dengan anggaran biaya serta persiapan audit.
2. Membuat dan mengupdate Audit Program sesuai dengan bidang Penugasan
3. Melaksanakan kegiatan audit (Keuangan dan Operasi, Investigasi dan Pemantauan tindak lanjut).
4. Memeriksa dan menganalisa tindak lanjut MTL yang diterima dari UPT dan menuangkan hasilnya pada laporan triwulanan.
5. Mencatat dan menganalisa penyimpangan/kecurangan pegawai beserta modus operasinya dan menuangkan pada laporan triwulanan.

Gambar IV – 4



JOB DESCRIPTION (URAIAN TUGAS) PERWAKILAN SPI REGIONAL I MEDAN
STAF ADMINISTRASI (HENDRY ARSALAN NIPPOS 969292740)

Fungsi :

Membantu Kaper/Wakaper dalam hal ketatausahaan, operasional dan pengarsipan guna menunjang kelancaran kegiatan audit.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Menerima, mengagenda, mencatat pada buku serah dan menyerahkan kepada Kaper/Wakaper serta para auditor.
2. Melakukan pengarsipan KD, SE, map baca dan peraturan lainnya pada bundel masing-masing.
3. Mempersiapkan absensi kehadiran setiap bulan dan membuat laporan kehadiran.
4. Mempersiapkan dan mengirimkan surat-surat keluar.
5. Menggandakan/mengirimkan LHA, MTL dan pelaporan lainnya.

Gambar IV – 5

b. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko melibatkan proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas. Pada wawancara yang telah peneliti lakukan, informasi yang didapati menyatakan bahwa :

1. Visi, misi, tujuan dapat diaplikasikan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh.
2. Penerapan audit internal telah beralih kepada audit internal berbasis resiko (reaktif), yang sebelumnya diterapkan audit internal proaktif.

c. Informasi dan Komunikasi

Dari hasil analisis dan wawancara yang peneliti lakukan, informasi yang didapatkan bahwa informasi internal secara teratur dilaporkan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan unit kerja termasuk faktor-faktor keberhasilan, dan permasalahan yang terjadi.

Salah satu Bukti transaksi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

BUKTI KELUAR KAS BANK
POSINDO-2018-P012000006-0000004158
Catatan ke - 003
Nomor : 1500261867
Tanggal : 28.11.2018

Telah dibayarkan sejumlah dana kepada : 7900008912 - VENDOR BEBAN UMUM SSC KUG
Untuk keperluan : By pemakaian air,PBB,perlengkapan ktr KP-KTC
Dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Dokumen | Kode Rekening | Uraian | Jumlah (IDR) |
|-------|------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 001 | 6200020540 | 5104010004 | Pemakaian Air/Gas | 50.000 |
| 002 | 6200020540 | 5104010006 | Pajak Bumi Dan Bangunan | 21.320 |
| 003 | 6200020540 | 5103010002 | Perlengkapan Kantor | 400.000 |
| TOTAL | | | | 481.320 |

Terbilang : Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah

Orisator
MANAJER KEUANGAN REG-1
MASRIDAL, SE, Akt
NIPPOS : 969331678

Penerima

Gambar IV – 6

Tanggal : 21.11.2018

Kantor : Kantor Perwakilan PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh
 Direktorat Keuangan


Mohon persetujuannya untuk mencairkan dana kepada : 7900008912 - VENDOR BEBAN UMUM SSC KUG

Untuk keperluan pembayaran : Biaya SSC KUG Kutacane
 Dengan rincian sebagai berikut : by pemakaian air,PBB,perlengkapan ktr kp ktr

| No | Kode Rekening | Uraian | Jumlah (IDR) |
|-----|---------------|-------------------------|----------------|
| 001 | 5104010004 | Pemakaian Air/Gas | 60.000 |
| 002 | 5104010006 | Pajak Bumi Dan Bangunan | 21.320 |
| 003 | 5103010002 | Perlengkapan Kantor | 400.000 |
| | | | |
| | | PPH Ps 21 | 0 |
| | | PPH Ps 22 | 0 |
| | | PPH Ps 23 | 0 |
| | | PPH Ps 4(2) | 0 |
| | | PPN WAPU | 0 |
| | | TOTAL | 481.320 |

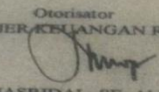
Terbilang : Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah

Ordonatur
DEPUTI UMUM



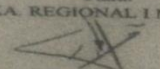
(AKHMAD RIDWAN)
NIPPOS : 968330812

Otorisator
MANAJER KEUANGAN REG-1




(MASRIDAL, SE, Akt)
NIPPOS -969331678

Fiatur
KA. REGIONAL I MEDAN



(SRI HENDARTO)
NIPPOS : 967275489

Kontrol Posting
ASMAN AKUNTANSI REG-1



(TAQWAN NUR AZIZ)
NIPPOS : 971314913

Gambar IV – 7

d. Aktivitas Pengendalian

Dalam aktivitas pengendalian, selain pengendalian umum terdapat juga pengendalian aplikasi dimana didalamnya diterangkan prosedur otorisasi yang memadai, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup, dan pengecekan secara independen. Maka data yang peneliti ambil sebagai sampel pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh adalah bukti kas keluar yang telah di munculkan pada gambar IV-7.

Kas dapat diibaratkan darah bagi sebuah perusahaan, oleh karena itu setiap terjadinya pengeluaran kas harus dengan disertai bukti-bukti yang kuat dan

jelas serta dikendalikan dengan prosedur yang ditetapkan dengan tujuan menjaga agar kas yang keluar tetap dalam kontrol perusahaan. Bukti kas keluar pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh dapat dicetak melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, yaitu :

- a. Kasir membuat rencana anggaran yang diperlukan dan tidak terlepas dari pagu yang telah ditentukan, lalu meminta kas pada kantor pos medan dengan sebutan panjar untuk mendanai belanja-belanja atau biaya yang terdapat pada wilayah regional 1.
- b. Setiap divisi yang memerlukan kas untuk membiayai operasionalnya harus membuat rencana anggaran operasionalnya, lalu menyerahkannya kepada kasir sebagai pengganti daripada kas tersebut.
- c. Divisi yang telah merealisasikan belanja atas kegiatan operasionalnya dengan membuktikan kwitansi, nota pembelian, atau bon, lalu menyerahkannya kepada bagian akuntansi untuk di entry sebagai biaya atau disebut Pengajuan Entry Biaya.
- d. Setelah bagian akuntansi mengentry biaya tersebut, maka diterbitkan Nota Permintaan Pembayaran (NPP).
- e. NPP yang telah dibuat harus diotorisasi oleh pejabat-pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas biaya operasional tersebut. Lalu diserahkan kepada manajer keuangan untuk menerbitkan Bukti Kas Keluar Bank (BKKB).

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada petugas Loker Ekstensi, didapati informasi bahwa tidak adanya pemisahan fungsi antara tugas

manajer sebagai pengawas memvalidasi kegiatan yang petugas loket lakukan dengan tugasnya petugas loket itu sendiri. Keadaan ini berlangsung pada tiga loket ekstensi yang berada di kota medan.

e. Pemantauan

Tahapan ini memberikan keyakinan bahwa pengendalian internal telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik. Manajemen puncak pada PT. Pos Indonesia (Persero) selalu mendapat informasi terhadap status dan posisi penyelesaian hasil pemeriksaan. Dimana secara otomatis laporan (LHA) yang digunakan sebagai bentuk informasi bagi manajemen puncak saat ini telah dilaksanakan. Laporan Hasil Audit (LHA) dapat dikatakan sebagai ukuran kinerja auditor karena berisi kondisi yang penting dan berdampak terhadap capaian visi. Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PT. Pos Indonesia (Persero) membuat laporan hasil audit salah satunya pada keuangan dan operasi dalam bentuk Kertas Kerja Audit (KKA). Yang mana komponen-komponen KKA berbasis risiko tersebut berisi :

a. Lampiran 1 (Lamp-1), Risk Register

Risk register adalah daftar risiko yang menjadi alat manajemen untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko ke tingkat yang dapat diterima melalui proses peninjauan dan pembaruan. Risk Register disusun dan diterbitkan secara berkala oleh organ perusahaan yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko.

b. Lampiran 2 (Lamp-2), Pengujian Pengendalian Internal

Salah satu tujuan pelaksanaan audit berbasis risiko adalah melakukan pengujian atas pengendalian internal yang ada. Pengujian pengendalian internal ini dituangkan dalam satu format khusus yang mengadopsi pengujian pengendalian internal berbasis COSO.

c. Lampiran 3 (Lamp-3), Pengukuran Risiko

Pengukuran dan pengujian risiko dilakukan untuk mereview tingkat risiko yang adadalam Risk Register. Pengujian ini dilakukan berdasarkan peluang terjadinya risiko(*likelihood*) dan dampak negatif risiko (*consequence*).

Untuk melakukan analisis data terkait peluang dan dampak risiko diperlukan penentuan kriteria rating pada masing- masing risiko unit audit, misalnya untuk peluang terjadinya risiko menggunakan kriteria. Demikian pula untuk dampak risiko, dampak risiko merupakan bentuk materialitaspengaruh negatif risiko terhadap pencapaian tujuan. Penentuan kriteria ratingdilakukan dalam bentuk nilai besar uang, persentase, ataupun nilai kuantifikasi lainnya, misalnya untuk dampak risiko kinerja / penjualan adalah:

Tabel IV – 1

| R | Arti | Nilai |
|---|----------|----------------------|
| 1 | Sangat | $0 < PL < 0.5 \%$ |
| 2 | Rendah | $>0.5 \% < PL < 1.0$ |
| 3 | Menengah | $>1,0 \% < PL < 2.5$ |
| 4 | Tinggi | $>2,5 \% < PL < 5.0$ |
| 5 | Sangat | $\text{➤ } 5,0 \%$ |

Tabel IV – 2

| R | Arti | Nilai |
|---|----------|---------------------|
| 1 | Sangat | $0 < PL < 2.50 \%$ |
| 2 | Rendah | $>2.50 \% < PL <$ |
| 3 | Menengah | $>5,00 \% < PL <$ |
| 4 | Tinggi | $>7,50 \% < PL <$ |
| 5 | Sangat | $\text{➤ } 10,0 \%$ |

Tabel IV – 3

| R | Arti | Nilai |
|---|----------|----------------------|
| 1 | Sangat | $0 < PL < 3.0 \%$ |
| 2 | Rendah | $>3.0 \% < PL < 7.0$ |
| 3 | Menengah | $>7,0 \% < PL <$ |
| 4 | Tinggi | $>11,0 \% < PL <$ |
| 5 | Sangat | $\text{➤ } 15,0 \%$ |

Tabel IV – 4

| R | Arti | Nilai |
|---|----------|-------------------|
| 1 | Sangat | $0 < PL < 0.2 \%$ |
| 2 | Rendah | $>0.2 \% < PL <$ |
| 3 | Menengah | $>0,4 \% < PL <$ |
| 4 | Tinggi | $>0,6 \% < PL <$ |
| 5 | Sangat | $\gt 1,0 \%$ |

Setelah melakukan pengukuran risiko, maka tingkat exposure risiko dapat dipetakan sesuai dengan risk appetite (selera risiko) yang merupakan realitas pertimbangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan risiko. Pemetaan risiko dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel IV – 5

| URAIAN | | | Sangat Rendah | Rendah | Menengah | Tinggi | Sangat Tinggi |
|----------------------------------|---------------|---|--|---------|----------|---------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rating Peluang Risiko/Likelihood | Sangat Tinggi | 5 | Tinggi | Tinggi | Ekstrim | Ekstrim | Ekstrim |
| | Tinggi | 4 | Moderat | Tinggi | Tinggi | Ekstrim | Ekstrim |
| | Menengah | 3 | Rendah | Moderat | Tinggi | Ekstrim | Ekstrim |
| | Rendah | 2 | Rendah | Rendah | Moderat | Tinggi | Ekstrim |
| | Sangat rendah | 1 | Rendah | Rendah | Moderat | Tinggi | Tinggi |
| | | | Dampak Risiko/Consequence of risk | | | | |

d. Lampiran 4 (Lamp-4), Evaluasi Risiko

Untuk menggambarkan risiko secara lebih lengkap dan memberikan kemudahan dalam melakukan pengelolaan risiko digunakan format 4, Evaluasi risiko. Format kertas kerja ini pada dasarnya merupakan simpulan dari kertas kerja audit yang dilakukan sebelumnya (Lampiran 2, Pengujian Pengendalian internal dan Lampiran 3, Pengukuran Risiko).

e. Lampiran 5 (Lamp-5), Area Needing Improvement (ANI)

Area Needing Improvement (ANI) berisi hasil pengujian atas pengendalian internal yang telah dilakukan (pada Lamp-2 dan Lamp-4). Format ini diisi apabila pengendalian internal yang ada dinilai tidak memadai (yang dinyatakan pada Lamp-4, kolom 18). Selain berisi deskripsi tentang kelemahan pengendalian internal yang ada, Lamp-5 juga berisi usulan perbaikan atas pengendalian internal yang ada.

f. Lampiran 6 (Lamp-6), Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan kegiatan atau tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan potensi dampak negatif risiko terhadap pencapaian tujuan. Tindakan mitigasi risiko diharapkan menjadi solusi untuk memperkecil tingkat dan exposure risiko ke tingkat yang dapat diterima.

Dari analisis dan wawancara yang peneliti lakukan juga didapati informasi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh yang berkaitan

dengan tahapan pada pemantauan/pengawasan bahwa kecurangan (*fraud*) yang terjadi dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel IV – 6

| Jenis Kecurangan | Modus operandi | Keterangan |
|------------------|---|--|
| Kekurangan Kas | Menyetorkan uang kas tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan tidak pada tanggal atau hari yang sama. | *diawasi oleh manajer dan pertanggungjawaban berada pada kepala kantor |
| <i>Skimming</i> | Dengan sengaja menahan dan tidak memproses lebih lanjut atas beberapa transaksi penerimaan pembayaran dari pelanggan. | *diawasi oleh manajer dan pertanggungjawaban berada pada kepala kantor |

B. Pembahasan

1. Audit Internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh

Dalam upaya pencegahan terhadap *fraud*, maka audit internal yang dilakukan harus sebaik mungkin agar kelemahan pengendalian dapat ditemukan dan diperbarui dengan pengendalian yang lebih baik. Audit internal melakukan beberapa prosedur yang diantaranya yaitu :

1. Tahap perencanaan

Dari jawaban wawancara pada bagian SPI bahwa mereka melakukan audit internal dengan penjadwalan yaitu 1 tahun sekali, merumuskan auditor yang berkompeten pada bidang yang akan diaudit, anggaran yang diperlukan, serta penetapan sasaran dan tujuan audit yang dilakukan. Sesuai dengan pernyataan

Tugiman (2003, hal 53-59) bahwa “auditor internal harus merencanakan terlebih dahulu setiap tugas audit yang akan dilakukan dengan tujuan agar audit yang dilakukan terarah dan tepat sasaran.”

Berkaitan dengan kondisi yang ditemukan, dan juga perencanaan audit yang tertuang dalam program audit yang dibuat dan sudah dijalankan. Maka dalam hal ini audit internal telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan dan program audit yang sudah dibuat.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan (Pengujian)

Pada tahapan ini, proses pengujian yang dilakukan Audit Internal PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh sudah dijalankan dengan sangat baik. Dimana pengujian yang dilakukan Audit Internal PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh tercakup didalamnya mengumpulkan informasi, penyeleksian prosedur audit, melakukan pengawasan, dan membuat kerja audit. Sesuai dengan pernyataan Tugiman (2003, hal 59-68) bahwa “ proses pengujian dan pengevaluasian diantaranya adalah menguumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tujuan dan lingkup audit, informasi harus mencukupi penyeleksian prosedur audit, melakukan pengawasan, dan membuat kerja audit”.

Setelah melakukan observasi, wawancara dan melihat bukti pendukung berkaitan dengan kondisi yang ditemukan, dan juga pengujian yang diterapkan pada program audit, audit internal sudah melakukan pengujian dan pengevaluasian informasi secara memadai terhadap temuan sesuai dengan sasaran pemeriksaan bagian keuangan.

3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Dilihat dari laporan hasil audit PT. Pos Indonesia (Persero) pada rekomendasi hasil audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti berstatus nihil. Maka dapat dinyatakan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit sebelumnya telah dijalankan. Sesuai dengan pernyataan Tugiman (2003, hal 75) bahwa “pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindaklanjut untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.”

Berdasarkan dengan kondisi yang ditemukan dari tahapan perencanaan hingga pemantauan, maka dapat dinyatakan bahwa audit internal telah dilakukan dengan baik dan memadai.

2. Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh

a. Lingkungan Pengendalian

1. Struktur Organisasi

Letak posisi audit internal yang ada pada bagian SPI berada dibawah Direktur Utama sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sukrisno Agus (2013, hal 202) bahwa “salah satu kedudukan audit internal dalam struktur organisasi berada dibawah Direktur Utama”. Kondisi ini menunjukkan independensinya audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh, dan juga menjadi dasar bagi manajemen puncak dalam pengambilan keputusan

dengan meyakini independensinya bahwa audit internal dapat langsung memberikan laporan kepada direktur utama.

2. Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab

Dari uraian tugas (*job description*) pada bagian SPI, telah jelas ditetapkan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Kondisi ini telah sesuai dalam penjelasan SA seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern yang dikutip oleh Mulyadi.

b. Penaksiran Resiko

Dari wawancara yang peneliti lakukan, informasi yang didapat bahwa penerapan audit internal telah beralih kepada audit internal berbasis resiko, yang sebelumnya diterapkan audit internal proaktif. Visi, misi, tujuan dapat diaplikasikan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh. Kondisi ini telah sesuai dalam penjelasan SA seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern yang dikutip oleh Mulyadi.

c. Informasi dan Komunikasi

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada para pegawai SDM, informasi yang didapat bahwa mereka bertukar informasi/membahas mengenai pencapaian kerja dan masalah yang dihadapi secara internal melalui grup pada salah satu media smartphone sehingga menciptakan lingkungan kerja yang komunikatif. Kondisi ini sangat baik agar setiap pegawai dapat merespon dengan cepat setiap informasi yang didapati.

Dari sisi komunikasi yang menggunakan aplikasi, sampel yang digunakan adalah bukti kas keluar bank (bkkb) dan nota permintaan pembayaran (npp) PT. Pos Indonesia (Persero). Dalam bukti tersebut dapat diyakini keabsahannya, jelas siapa saja yang mengotorisasi, dinilai secara wajar, dan dicatat pada periode yang seharusnya. Kondisi ini sesuai dalam penjelasan SA seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern yang dikutip oleh Mulyadi.

d. Aktivitas Pengendalian

Dari sampel pengujian yang peneliti lakukan yaitu pada bukti kas keluar bank PT. Pos Indonesia (Persero), prosedur otorisasi yang dilakukan telah memadai. Dibuktikan dengan otorisasi oleh Manajer Keuangan sebagai otorisasi akhir sebagai dasar pencatatan terjadinya pengeluaran kas. Kondisi ini sesuai dalam penjelasan SA seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern yang dikutip oleh Mulyadi.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, kondisi yang diketahui pada loket ekstensi yaitu terjadi dwifungsi petugas loket sehingga dikhawatirkan dapat memberi peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*), *human error*, maupun menjadi pembebanan kerja yang tidak sama dengan yang lainnya. Kondisi ini tidak sesuai dalam penjelasan SA seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern yang dikutip oleh Mulyadi.

e. Pemantauan

PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh memiliki laporan hasil audit yang dimana artinya pemantauan atas pengendalian intern telah

dilaksanakan. Pada laporan hasil audit yang peneliti analisis, juga telah memuat pemantauan atas rekomendasi hasil audit sebelumnya yang telah ditindaklanjuti. Dalam laporan hasil audit pada PT. Pos Indonesia (Persero) pada 19 Desember 2018 dapat dikatakan baik, karena telah memenuhi semua standar yang telah ditetapkan dan peraturan yang tertuang dalam Keputusan Direksi tanggal 26 Desember 2018 No. 140/DIRUT/1218 perihal daftar resiko kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Laporan hasil audit pada PT. Pos Indonesia (Persero) dilakukan dimulai dari perencanaan, pengujian, melaporkan, serta rekomendasi sekaligus pemantauan tindak lanjut rekomendasi sebelumnya dan laporan audit internal disusun telah akurat, objektif, jelas, hemat kata-kata dan tidak berulang-ulang, serta mendorong kepada perbaikan sistematis dan tepat waktu.

Sesuai dengan pernyataan Moeller (2009, hal: 351) dalam Qhintera (2004) “Laporan hasil audit adalah sebuah dokumen formal yang menyimpulkan pekerjaan audit internal dengan melaporkan rekomendasi dan pengamatannya”. Maka dapat disimpulkan atas wawancara yang peneliti lakukan bahwa manajemen mendapatkan informasi dari audit internal sebagai pengambilan keputusan dengan dasar laporan hasil audit tersebut. Kondisi yang ditemukan adalah sesuai dalam penjelasan SA seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern yang dikutip oleh Mulyadi, sehingga dapat dinyatakan pemantauan sudah berjalan dengan baik.

Sehubungan juga daripada kondisi yang ditemukan pada wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat dinyatakan bahwa tugas yang dilakukan

eksekutor *fraud* adalah tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. Pihak yang bertugas sebagai pengawas sekaligus penanggungjawab disini adalah bagian pengawasan melekat (waskat) yang seharusnya dapat mencegah *fraud* tersebut terjadi. Maka integritas pada diri pegawai seharusnya dipertahankan untuk mendapatinya tujuan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya melalui wawancara dan dokumentasi yang peneliti dapatkan sesuai dengan judul penelitian yaitu peranan audit internal dalam pencegahan *fraud* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Audit internal yang dilakukan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh telah memadai. Dimana pengkajian daripada unsur-unsur audit internal yaitu mulai tahap perencanaan, pengujian, pembahasan temuan, hingga pemantauan tindak lanjut, yang telah peneliti analisis pada bab sebelumnya telah sejalan dengan peraturan dan teori yang ada.
2. Audit internal yang dilakukan telah berperan dalam pencegahan *fraud* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh. Dimana unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat menemukan kecurangan-kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada perusahaan tersebut.
3. Peranan audit internal dalam pencegahan *fraud* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh telah dikatakan berperan dengan pengkajian unsur-unsur pengendalian intern yang telah diterapkan perusahaan mulai dari lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi,

hingga aktivitas pengendalian, semuanya telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti berusaha memberikan saran kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh terkhusus kepada bagian SPI yang sekiranya dapat bermanfaat. Sesuai dengan topik yang telah peneliti jelaskan, adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh harus lebih efektif lagi dalam menciptakan pengendalian intern terkhusus pada tahapan pemantauan/pengawasan agar benar-benar dapat mencegah terjadinya risiko *fraud* dengan membuat prosedur yang lebih rutin tetapi tetap menyesuaikan dengan biaya yang diperlukan dan padu pada proses pengawasan.
2. Sebaiknya fungsi petugas loket sekaligus pengawas dipisahkan atau dengan cara melimpahkan fungsi pengawas kepada pegawai atasan dalam struktural sehingga tidak dikhawatirkan dapat memberi peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*), *human error*, maupun menjadi pembebanan kerja yang tidak sama dengan yang lainnya.
3. Bagi perusahaan dalam perekrutan SDM dimasa mendatang, sebaiknya lebih memprioritaskan dalam pengujian integritas calon pegawai yang akan direkrut, guna mendapatkan SDM yang unggul dan dapat dipercaya sehingga dapat menurunkan tingkat risiko *fraud*.
4. Untuk penelitian selanjutnya mengenai peranan audit internal dalam pencegahan *fraud* perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mencari hubungan integritas SDM dengan risiko *fraud*, sehingga nantinya dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi audit internal dalam menciptakan pertahanan dalam mencegah *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- ACCA (2013). *Association of Chartered Certified Accountants*.
<http://www.accaglobal.com> Diakses 2 Desember 2018
- ACFE, (2016). *Survai Fraud Indonesia*. Report to The Nations (RTTN)
<http://acfe-indonesia.or.id> Diakses 1 Desember 2018
- Agoes, Sukrisno. (2012). *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)*. Edisi 4. Buku1. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. (2013). *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)*. Edisi 4. Buku2. Jakarta: Salemba Empat.
- Albrecht, W.Steve. (2003). *Fraud Examination*. South Western: Thompson
- Amrizal (2004). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Audit*. Bandung : Alfabeta
- Andayani, Wuryan (2011). “Audit Internal”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Univeritas Sunan Kalijaga. Vol.1 No. 1,2017
- Anggraeni, Intan Riana (2010). *Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Fraud : Studi Kasus pada PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung*. Skripsi S1, Universitas Widyatama. Bandung
- Arens, Alvin A dan James K. Loebbecke (2009). *Auditing & Assurance Service*. Jakarta : Salemba Empat
- Ety Meikhati (2015), “Peranan Audit Internal dan pencegahan Fraud Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal (Studi kasus pada Yayasan Internusa Surakarta)”. *Jurnal*.
- IAPI/Institut Akuntan Publik Indonesia (2013). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat. <http://auditme-post.blogspot.com>
Diakses 1 Desember 2018
- Ikhsan, Arfan, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citapustaka Media
- Karni, Soejono (2000). *Auditing Audit Khusus dan Audit Forensik dalam Praktik*. Edisi Pertama. Jakarta: Lembaga Penelitian FEUI. <https://repository.widyata.tama.ac.id> diakses 25 November 2018.

- Karyono (2013). *Forensik Fraud*. Edisi 1. Yogyakarta : CV. Andi
- Kusumah, Ihsan (2008). *Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (fraud): Studi Kasus pada Kantor PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung*. Skripsi S1, Universitas Widyatama. Bandung.
- Ludita Nilam Ariani (2013), “*Pengaruh Peranan Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN Jember*”. *Jurnal*.
- Miftah,Thoha (2012). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. <https://books.google.co.id> Diakses 20 November 2018
- Mulyadi (2013). *Auditing*. Edisi 6. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sawyer’s (2002). *Internal Auditing*. Edisi. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sinaga, N. S.B. (2008). “*Peranan Keahlian Internal Auditor dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan (Fraud)*”. Fakultas Ekonomi. Universitas Trisakti.*Jurnal*.
- Snowahyuni (2017). “*Audit Internal : Sejarah, perkembangan, dan gambaran umum*” <https://snowahyuni.wordpress.com> Diakses 17 Desember 2018.
- Soekanto, Soerjono (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sriwulandari (2017). *Peranan Audit Internal Dalam Pelaksanaan Pengendalian Internal: Studi Kasus pada PDAM Tirtanadi Provisi Sumatera Utara*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan
- Suginam (2017). “*Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud*”. *Jurnal riset Akuntansi*, Fakultas Ekonomi STMIK Budi Darma. Vol.1 No.1, Februari 2017.
- Tuanakotta, Theodorus (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, Theodorus (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Tugiman, Hiro (2001). "*Pandangan Baru Internal Auditing*". Cetakan Kelima. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI) <https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1NDCM> Diakses 1 Desember 2018
- Tugiman, Hiro (2003). "*Standar Profesional Audit Internal*". Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI) https://books.google.co.id/books?id=66N66_QrYC&printsec=frontcover&dq=hiro+tugiman&hl=ban&sa=X&ved=0ahUKEwjH07WvLfAhVJvY8KHQqyAa8Q6AEIJTAA Diakses 24 November 2018
- Widaningsih, Mimin dan Desy Nur Hakim (2015). "Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud*". *Jurnal riset Akuntansi dan Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Vol. 3 No.1, 2015